



Kementerian Pertanian  
Republik Indonesia

# LANGKAH SYL MEWUJUDKAN SWASEMBADA BERAS DITENGAH TANTANGAN YANG TIDAK BIASA

Kado  
HUT RI  
ke-77

DIRGAHAYU  
REPUBLIK  
INDONESIA

77

**LANGKAH SYL  
MEWUJUDKAN SWASEMBADA BERAS  
DITENGAH TANTANGAN  
YANG TIDAK BIASA**

**ACHMAD SURYANA, DKK**

**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2022**



Cetakan Pertama Agustus 2022  
Cetakan Kedua Oktober 2022

## PENGARAH

Prof. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H.  
(Menteri Pertanian RI)

## PENASIHAT

Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc  
(Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI)

## PENANGGUNG JAWAB

Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si  
(Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian RI)

## PENYELARAS

Prof. (Riset) Dr. Ir. Achmad Suryana, MS  
Dr. Ir. Sudi Mardianto, M.Si  
Prof (Riset) Dr. Ir. Irsal Las, MS  
Prof. Ir. Muhammad Arsyad, SP., M.Si., Ph.D  
Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec  
Prof. (Riset) Dr. Ir. Tahlim Sudaryanto, MS

## PENULIS

Prof. (Riset) Dr. Ir. Achmad Suryana, MS  
Dr. Ir. Sudi Mardianto, M.Si  
Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si  
Prof. (Riset) Dr. Ir. Erizal Jamal, M.Si  
Dr. Ir. Abdul Basit, MS  
Dr. Saefudin, S.P., M.Si  
Dr. Ir. Adang Agustian, MP  
Dr. Endro Gunawan, SP, ME  
Dr. Ir. Ranny Mutiara Chaidirsyah  
Dr. Iim Mucharam, SP, MP

## PENDUKUNG

Mirza Sativa, SP, M.Si  
Akbar Choer, S.Pt  
Naufal Nur Mahdi, SE, M.Si  
Nur Rokhmah Fitriani, SP  
Ruri Sitaesmi, SP

## FOTO

Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian

## DESAIN COVER & LAYOUT

Andy Mashudi, A.Md.

## Penerbit :

Kementerian Pertanian  
Jl. Ir. H. Juanda No.20, Kota Bogor 16122, Indonesia  
Telp (0251) 8321746, Fax (0251) 8326561

Cetakan Pertama : Agustus 2022

Cetakan Kedua : Oktober 2022

ISBN : 978-979-582-201-1

# PENGANTAR MENTERI PERTANIAN

Tidak dapat dipungkiri, sampai saat ini beras masih menjadi bahan pokok bagi sebagian besar masyarakat negeri ini. Menjadi tugas besar, berat dan sekaligus mulia bagi kita, seluruh insan pertanian, memastikan ketersediaan bahan pangan yang satu ini agar selalu tersedia lebih dari cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Tentu, menjadi syarat perlu bagi bangsa ini mewujudkan visi Indonesia swasembada beras.



Empat dekade lalu, yaitu tahun 1984, Indonesia pernah merasakan nikmatnya swasembada beras, namun masa-masa keemasan itu perlahan memudar. Kisah keemasan tentang swasembada beras di negeri ini telah meredup gaungnya selama bertahun – tahun. Cerita mengenai ketahanan pangan dan swasembada beras itu kemudian seperti impian, susah kembali untuk diraih. Visi itu sangat mulia dan sulit, tetapi bukanlah mustahil untuk dicapai. Semenjak dilantik 3 tahun lalu mengemban amanah sebagai Menteri Pertanian dalam Kabinet Indonesia Maju dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo, segala upayaupun telah dilakukan hingga akhirnya kerja keras itu menjadi kenyataan kembali.

Ditengah tantangan dan ketidakpastian global, mulai dari tantangan klasik usaha tani padi, perubahan iklim ekstrem dan wabah pandemi Covid-19 yang belum pulih, dan terjadinya tekanan geopolitik dunia, berkat kerja keras seluruh insan pertanian, khususnya para petani kita, kita mampu mewujudkan visi mulia swasembada beras. Terbukti tiga tahun terakhir berturut-turut, secara meyakinkan, Indonesia tidak mengimpor beras dan produksi nasional benar-benar mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Saya sangat mengapresiasi disusunnya buku **“Langkah SYL Mewujudkan Swasembada Beras Ditengah Tantangan Yang Tidak Biasa”** ini, karena perjalanan menempuh peningkatan produksi padi untuk swasembada beras dan usaha keberlanjutannya ditengah ancaman krisis pangan dunia, akan dapat dibaca oleh banyak kalangan dan terutama generasi penerus yang diharapkan mampu menjadi inspirasi dan motivasi agar lebih meningkatkan upaya keberlanjutan swasembada beras menuju



pertanian yang maju, mandiri dan modern, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani.

Seperti peribahasa “Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama” artinya tidak ada manusia yang hidup abadi, ketika seseorang sudah meninggal atau menyelesaikan suatu tugas besar dalam hidupnya, maka orang tersebut akan dikenang karena dua hal, yakni karena jasa-jasanya, karena warisan positifnya, atau sebaliknya. Karenanya, saya selalu menekankan mengenai sebuah warisan (*legacy*) yang perlu dihadirkan dalam setiap langkah-langkah kita membangun pertanian karena akan meninggalkan jejak pada generasi berikutnya. Orang-orang besar selalu meninggalkan *legacy* dan berharap sejarah juga akan mencatat setiap langkah kita dalam memajukan pertanian negeri ini. Tak hanya itu, pengalaman pendahulu kita musti diambil sebagai pembelajaran, sehingga cita-cita pendahulu kita untuk Indonesia yang berdaulat, adil, makmur dan sejahtera mampu kita wujudkan. Keberhasilan swasembada beras pada tahun 1984 dan kemudian kita capai kembali dalam 3 tahun terakhir ini, harus menjadi momentum emas untuk kita jaga dan lestarian serta kembangkan pada komoditas lain yang strategis yang dapat kita wariskan bagi masa depan anak cucu kita. Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI ke-77, saya dan seluruh jajaran Kementerian Pertanian beserta seluruh Insan Pertanian, khususnya petani padi mempersembahkan kado istimewa bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sebuah *legacy* “Keberhasilan Swasembada Beras” untuk Indonesia tercinta.

Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah terlibat dalam penulisan buku ini termasuk kerja keras editor, kontributor penulisan dan pihak lainnya yang memakan waktu yang tidak pendek. Saya berkeyakinan dengan hadirnya buku ini dan dengan segala kekurangannya akan sangat bermanfaat bagi kelanjutan pembangunan pertanian di masa depan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahi rahmat kepada kita semua dalam bekerja membangun pertanian Indonesia yang lebih maju, mandiri dan modern.

Dirgahayu Negeriku, Dirgahayu Republik Indonesia.  
Jayalah Pertanian Indonesia!

Jakarta, 17 Agustus 2022



Syahrul Yasin Limpo  
Menteri Pertanian RI

# DAFTAR ISI

<b>ii</b>	<b>PANGANTAR MENTERI PERTANIAN</b>
<b>iv</b>	<b>DAFTAR ISI</b>
<b>v</b>	<b>DAFTAR GAMBAR</b>
<b>v</b>	<b>DAFTAR TABEL</b>
<b>vi</b>	<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>
<b>1</b>	<b>BAB I MANAJEMEN SYL MEWUJUDKAN SWASEMBADA BERAS</b>
<b>9</b>	<b>BAB II MERUBAH TANTANGAN MENJADI PELUANG</b>
	<b>11 ■ Tantangan Pencapaian Swasembada Beras</b>
	<b>16 ■ Menjadikan Tantangan sebagai Peluang</b>
<b>25</b>	<b>BAB III STRATEGI TEPAT DALAM KETERBATASAN</b>
	<b>30 ■ Refocusing Program dan Anggaran</b>
	<b>33 ■ Strategi Lima Cara Bertindak</b>
	<b>40 ■ Strategi “Budget for Agriculture”</b>
<b>48</b>	<b>BAB IV KEBUTUHAN TERPENUHI, KETAHANAN PANGAN TERJAGA</b>
	<b>50 ■ Swasembada Beras di Masa Pandemi</b>
	<b>54 ■ Ketahanan Pangan Nasional Terjaga</b>
<b>59</b>	<b>BAB V PEMBELAJARAN MANAJEMEN SYL</b>
	<b>62 ■ Keberhasilan Manajemen SYL</b>
	<b>64 ■ Optimalisasi Manajemen SYL</b>
	<b>66 ■ Upaya Menjaga Swasembada Berkelanjutan</b>
<b>71</b>	<b>BAB VI PENUTUP</b>
<b>78</b>	<b>PROFIL MENTERI PERTANIAN SYAHRUL YASIN LIMPO</b>





## DAFTAR GAMBAR

- 7** Gambar 1.1 Perkembangan Suplai dan Harga Beras
- 36** Gambar 3.1 Produktivitas Padi Indonesia Tertinggi Kedua di ASEAN
- 41** Gambar 3.2 Kinerja Pembiayaan KUR Sektor Pertanian, 2020-2021
- 53** Gambar 4.1 Produksi, Konsumsi dan Surplus Beras Nasional, 2019-2022

## DAFTAR TABEL

- 55** Tabel 4. 1 Angka PoU, prevalensi FIES, dan skor PPH, 2019-2021

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan pokok, merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan di banyak negara. Untuk Indonesia, itu diterjemahkan dalam bentuk ketersediaan beras. Syahrul Yasin Limpo atau biasa disingkat dengan SYL, sangat menyadari hal itu. Sehingga pernyataan pertamanya pasca pelantikan sebagai Menteri Pertanian adalah, akan terus mengupayakan peningkatan produksi pangan strategis, terutama beras. Berbekal pengalaman sebagai pamong praja dalam berbagai posisi dan jabatan di Sulawesi Selatan, SYL memahami betul berbagai persoalan untuk dapat meningkatkan produksi beras di Indonesia.

Usahatani padi melibatkan jutaan rumah tangga petani, dan umumnya diisi oleh petani yang semakin menua (*aging*). Rumah tangga petani mengusahakan sawah secara mandiri, dalam petakan yang tidak terlalu luas, dan selalu terancam keberadaannya karena alih fungsi ke penggunaan lain. Untuk mendapatkan air harus bersaing dengan penggunaan lain, dan kualitas air yang didapat juga semakin menurun. Dengan kondisi semacam ini, tantangan untuk dapat mencukupi produksi beras menjadi tidak mudah. Ditambah lagi fenomena perubahan iklim, yang ditandai meningkatnya intensitas curah hujan sehingga terjadi banjir (*La Niña*) dan sebaliknya dapat menimbulkan kemarau panjang sehingga terjadi kekeringan (*El Niño*). Belum genap 6 bulan menjalani tugas sebagai Menteri Pertanian, wabah pandemi COVID 19 menyerang Indonesia. Bagi pembangunan pertanian, COVID 19 berdampak karena adanya pembatasan pergerakan masyarakat, dan yang paling utama anggaran pembangunan yang dikucurkan negara melalui APBN semakin terbatas karena dialihkan untuk penanganan COVID 19.

Menghadapi semua situasi di atas dengan cerdas SYL menjadikannya sebagai arena pembuktian, bahwa dibalik semua tantangan, terbuka peluang bagi yang kreatif dan mau berpikir *business not as usual*. Ada dua hal kunci yang dilakukan, Pertama, semua tantangan dijadikan sebagai inspirasi dan motivasi dalam merancang upaya dan cara bertindak (program dan kebijakan). Kedua adalah mencari dan menyiapkan teknologi dan inovasi yang sesuai untuk mengatasi tantangan menuju keadaan yang lebih baik.



Tantangan yang sifatnya melekat pada usaha tani padi, diatasi dengan perluasan areal pertanaman dan peningkatan produktivitas. Peningkatan indeks pertanaman dimaksimalkan, jika memungkinkan sampai IP400. Bersamaan dengan itu, perluasan areal tanam dilakukan dengan pengembangan atau pemanfaatan lahan sub-optimal, seperti lahan kering, lahan rawa, serta pasang surut. Peningkatan produktivitas padi dilaksanakan dengan pengelolaan sarana produksi, terutama peningkatan pemanfaatan benih padi unggul spesifik agro-ekosistem. Pengembangan korporasi petani dan Kawasan Sentra Produksi Pangan (*Food Estate*), merupakan dua inovasi rekayasa sosial-ekonomi era SYL dalam menyasiasi dominasi skala usaha kecil (gurem) pada usaha tani padi.

Untuk menjawab tantangan perubahan iklim, SYL mengoptimalkan berbagai inovasi teknologi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, antara lain penggunaan varietas padi tahan cekaman, dan aplikasi paket teknologi dan sistem informasi kalender tanam (KATAM). Ancaman COVID 19 dijawab dengan membangun kolaborasi dengan banyak pihak, untuk mempertahankan keberdayaan petani dalam berusahatani. Peluang yang dimanfaatkan adalah keberadaan teknologi digital yang dapat digunakan dalam praktik usahatani dan memperlancar sistem distribusi input serta pemasaran hasil. Bagi petani terdampak COVID 19, dilaksanakan sejumlah proyek padat karya yang memungkinkan petani mendapat dana segar secara langsung. Sementara jaminan asuransi pertanian diperluas, demikian juga akses petani terhadap Kredit Usaha Rakyat atau KUR.

Ditengah keterbatasan anggaran, Kementerian Pertanian beberapa kali melakukan *refocusing*, terutama untuk penanganan dampak COVID 19. Menghadapi situasi ini SYL membangun strategi **"budget for agriculture"**, yaitu memobilisasi anggaran non-APBN untuk mendukung pembangunan pertanian, utamanya pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan melibatkan pelaku usaha (BUMN/Swasta).

Terkait penyaluran KUR, ini merupakan salah satu strategi SYL mengatasi keterbatasan APBN. Pada tahun 2019, jumlah KUR di sektor pertanian sebesar Rp29,8 Triliyun, dan jumlah ini meningkat hampir tiga kali lipat menjadi Rp85,5 triliun pada tahun 2021. Pada tahun 2020, dukungan pembiayaan KUR di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan hampir empat kali lipat dibandingkan dengan APBN murni di keempat subsektor tersebut. Bahkan untuk subsektor perkebunan, pembiayaan dari KUR mencapai sebelas kali lipat dari APBN Ditjen Perkebunan.

Untuk menggerakkan semua rancangan pembangunan di atas, SYL membangun Komando Strategis Pertanian (Kostratani), dengan menjadikan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) kecamatan sebagai pusat informasi dan komunikasi interaksi petani-penyuluh, Serta sebagai pusat koordinasi/pengendali pembangunan pertanian semua aktivitas dalam Kostratani dipantau melalui *Agriculture War Room (AWR)*, dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan pencitraan satelit dan *artificial intelligent*.

Agar arah pelaksanaan pembangunan pertanian fokus dan terintegrasi dalam pelaksanaannya, Kementan merumuskan **Lima Cara Bertindak (5 CB)**, yang meliputi:  
(1) peningkatan kapasitas produksi,  
(2) diversifikasi pangan lokal,





(3) penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, (4) pengembangan pertanian modern, dan (5) peningkatan ekspor tiga kali lipat

Strategi 5 CB di atas menjadi landasan dalam menjaga kontinuitas produksi dan ketersediaan padi. Hasilnya, walaupun selama tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan luas panen padi sebesar 20,61 ribu hektar (2020) dan 245 ribu hektar (2021). Namun jumlah produksi padi pada tahun 2020 dan 2021 tetap dapat dipertahankan di atas 54 juta ton, hal ini terjadi karena adanya peningkatan produktivitas sebesar 0,30% pada tahun 2020 dan 1,95% dari tahun 2021. Kondisi ini membawa Indonesia mengalami surplus beras pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 2,13 juta ton dan 1,36 juta ton. Sejalan dengan keberhasilan ini, beberapa indikator ketahanan pangan Indonesia yang diukur dari Prevalensi Kekurangan Gizi, Skala Pengalaman Kerawanan Pangan, dan Pola Pangan Harapan (PPH), memperlihatkan bahwa ketahanan pangan nasional memang terganggu dengan adanya pandemi Covid-19. Namun demikian, penurunannya tidak terjadi secara drastis, bahkan di tahun 2021 sudah mulai kelihatan adanya tanda pemulihan.

Pencapaian SYL terkait swasembada beras, yang ditandai tidak impor beras berturut-turut dalam tiga tahun terakhir, bukanlah “keberuntungan dan *autopilot*”, namun hasil dari suatu program dan kebijakan yang didesain (*by design*) melalui manajemen SYL. Hal itu juga diakui oleh berbagai Lembaga Internasional, antara lain *International Rice Research Institute (IRRI)* dan *Food and Agriculture Organization (FAO)*. Ke depan masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dituntaskan untuk menjamin keberlanjutan swasembada beras. Beberapa langkah SYL yang perlu dilanjutkan antara lain memberikan kesempatan besar kepada para pelaku usaha (swasta maupun BUMN/BUMD), serta makin mendorong peran aktif pemerintah provinsi dan kabupaten, untuk peningkatan produksi pertanian, utamanya padi.

“

Indonesia sudah tidak mengimpor beras selama tiga tahun terakhir, setelah sebelumnya mengimpor 1,5-2 juta ton beras setiap tahunnya. Saya berharap, capaian tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan menggenjot produktivitas petani beras di dalam negeri.

*Presiden Joko Widodo*

(Kompas.com 21 Mei 2022)





# BAB I

# MANAJEMEN SYL MEWUJUDKAN SWASEMBADA BERAS





**P**embangunan ketahanan pangan di Indonesia hingga saat ini sering kali direduksi sebagai upaya pencapaian ketahanan pangan beras, karena beras merupakan komoditas strategis secara sosial, ekonomi, dan politik. Kebijakan pangan pada umumnya terkonsentrasi pada upaya penyediaan beras yang cukup untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat sepanjang waktu.

Persepsi ini tidak hanya dianut oleh unsur-unsur pemerintah saja, tetapi juga dipahami oleh seluruh komponen bangsa lainnya, seperti anggota legislatif, organisasi kemasyarakatan, pemerhati kebijakan pangan, dan media massa. Bustanil Arifin yang menjadi Kepala Bulog selama 20 tahun (1973-1993) mengemukakan beras sebagai pangan pokok mempunyai kedudukan yang teramat vital dan fatal. Vital karena beras adalah kebutuhan dasar sebagian besar manusia Indonesia sehingga fatal apabila penyediaannya defisit dan dapat dijadikan alat kekuatan politik oleh berbagai kalangan.

Fakta politik ini dipahami benar oleh Syahrul Yasin Limpo (SYL), sehingga pada saat beliau diberi amanah sebagai Menteri Pertanian (23 Oktober 2019), arahan kebijakan utama yang pertama kali disampaikan adalah akan tetap dan terus mendorong peningkatan produksi pangan strategis, terutama beras, dengan memanfaatkan keunggulan sumber daya yang dimiliki dan teknologi inovatif yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi



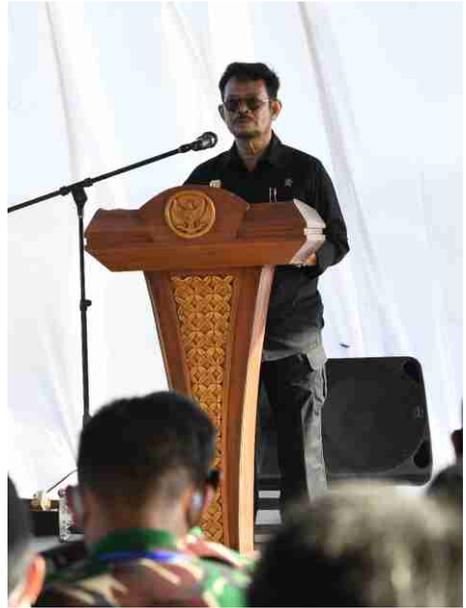
***Dalam berbagai kesempatan SYL menyatakan bahwa kebutuhan pangan pokok rakyat yang mencapai 273 juta jiwa harus dapat terpenuhi, apabila tidak ingin terjadi gejolak sosial, bahkan politik di masyarakat.***

Untuk itu, berbagai rancangan program disusun untuk memastikan produksi pangan strategis ini dapat terus meningkat memenuhi kebutuhan yang juga naik setiap tahun, baik melalui peningkatan produktivitas maupun perluasan areal tanam. Peringatan *Food and Agriculture Organization* (FAO) bahwa adanya potensi gangguan produksi pangan dunia akibat perubahan iklim, makin mendorong perlunya dipersiapkan langkah jitu antisipatif, seperti penyediaan benih unggul, perbaikan infrastruktur pengairan, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), dan dukungan teknologi digital (*Agriculture War Room-AWR*).

Namun pada saat program tersebut akan mulai dijalankan, Pandemi Covid-19 merebak ke seluruh dunia, termasuk Indonesia (pertama kali diumumkan 2 Maret 2020). Akibatnya, rancangan program perlu disesuaikan, karena Pandemi Covid-19 telah mendorong pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga pada akhirnya sangat berdampak serius terhadap pendapatan (baca: penurunan daya beli) masyarakat. Besarnya kebutuhan anggaran untuk menanggulangi Pandemi Covid-19 dan menjaga daya beli masyarakat, mendorong pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L), tidak terkecuali Kementerian Pertanian (Kementan).

“

Dampak perubahan iklim yang diperparah oleh Pandemi Covid-19 telah menghadapkan Kementan dalam posisi yang pelik; karena kegiatan dan usaha pertanian harus tetap berjalan walaupun di tengah-tengah pembatasan mobilitas penduduk dan alokasi anggaran yang terbatas.



Namun demikian, situasi yang sulit tersebut harus segera disikapi dengan bijak dan taktis, bahkan dijadikan sebagai pemicu atau motivasi agar aktivitas usaha pertanian dapat tetap berjalan serta daya beli petani terjaga dan terlindungi dari paparan Covid-19. Langkah cepat yang dilakukan oleh SYL adalah melakukan *refocusing* anggaran Kementan yang diarahkan dalam bentuk jaring pengaman sosial (perbaikan jaringan irigasi yang dikerjakan petani) dan upaya pengamanan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Pengamanan ketersediaan pangan dilakukan melalui: (1) upaya pengamanan, peningkatan dan pemantapan sistem produksi pangan, terutama padi, (2) kegiatan operasi pasar pangan murah dan stabilisasi harga pangan, (3) pemberian bantuan penyerapan gabah dan transportasi/angkut distribusi pangan, (4) pemantapan ketersediaan serta stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok. Instrumen kebijakan antara lain dilaksanakan melalui bantuan dan penyaluran sarana produksi dan bantuan biaya distribusi dari daerah produsen ke pasar, pengembangan outlet pemasaran melalui toko tani/pasar tani, dan kerja sama dengan layanan transportasi *online* untuk pengantaran barang ke konsumen.

# GERAKAN PERCEPATAN TAI PADA MUSIM KEMAR DI KABUPATEN TUBA JAWA TIMUR

Tuban, 26 Juni 2020



Strategi lain yang diarahkan SYL adalah menyusun program yang dapat beradaptasi di masa pandemi, yang dirumuskan dalam :

## 5 Cara Bertindak (CB)

(1) Peningkatan Kapasitas Produksi

(2) Diversifikasi Pangan Lokal

(3) Penguatan dan Sistem Logistik Pangan

(4) Pengembangan Pertanian Modern

(5) Peningkatan Ekspor

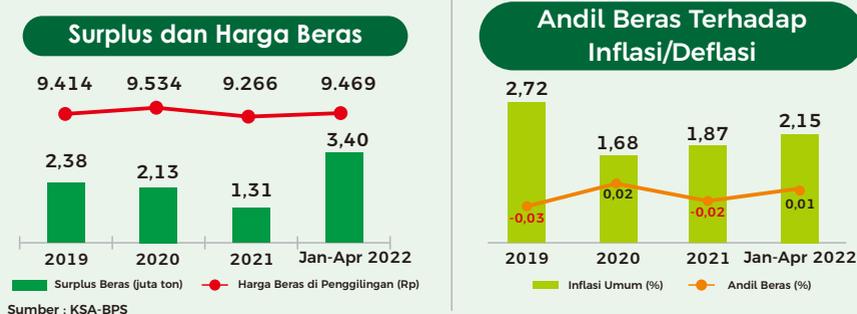
“ Gerak cepat dan upaya strategis yang dilakukan SYL dalam mengamankan pangan pokok strategis, khususnya beras, selama pandemi ternyata mampu meningkatkan produksi dan ketersediaan bahan pangan, sehingga dapat mengondisikan stabilitas harga pangan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras tahun 2020 mencapai 31,50 juta ton, atau meningkat sebesar 0,61 persen dibandingkan 2019 yang sebesar 31,31 juta ton. Capaian produksi tersebut telah mampu mencukupi kebutuhan beras domestik yang sebesar 29,37 juta ton, sehingga terdapat surplus produksi beras sekitar 2,13 juta ton. Produksi tahun 2021 (31,36 juta ton) walaupun sedikit menurun dibandingkan 2020, namun masih dapat memenuhi kebutuhan konsumsi yang sebesar 30,04 juta ton, sehingga tetap diperoleh surplus produksi beras sebesar 1,31 juta ton.

Keberhasilan manajemen SYL dalam menjaga tingkat produksi beras domestik agar senantiasa dapat memenuhi kebutuhan selama masa pandemi dan ditengah ancaman perubahan iklim, selain oleh para pihak dan pemangku kepentingan, perlu pula diketahui oleh masyarakat luas. Untuk itu, uraian lebih lanjut dalam buku ini menyajikan kiat dan strategi manajemen SYL yang lebih detail yang dikemas dalam urutan Bab sebagai berikut: (a) Merubah Tantangan Menjadi Peluang; (b) Strategi Tepat Dalam Keterbatasan; (c) Kebutuhan Terpenuhi, Ketahanan Pangan Terjaga; (d) Pembelajaran Manajemen SYL; dan (e) Penutup.

## Suplai Beras Mencukupi Harga Beras Terkendali

**Gambar 1.1 Perkembangan Suplai dan Harga Beras**



- Produksi beras nasional mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (surplus). Hal ini berdampak pada harga beras dalam negeri yang relatif terkendali.
- Selama empat tahun terakhir, angka andil inflasi beras selalu di bawah 0,2 persen. Pada tahun 2019 dan 2021, beras menyumbang deflasi masing-masing sebesar 0,03 persen dan 0,02 persen.
- Stabilitas harga beras memiliki andil besar dalam pengendalian inflasi, karena beras memiliki bobot yang terbesar dalam kelompok komoditas bahan makanan dan harga bergejolak.



## **BAB II**

# **MERUBAH TANTANGAN MENJADI PELUANG**





# Tantangan Pencapaian Swasembada Beras



Pencapaian ketahanan pangan dan gizi merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang menjadi tugas utama Kementan untuk mewujudkannya. Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat tujuh Prioritas Nasional (PN), salah satunya adalah PN nomor 1 yaitu: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dalam PN tersebut terdapat Program Prioritas (PP) nomor 3 yaitu: Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan.

Mengingat beras merupakan pangan pokok sumber karbohidrat utama dalam menu makan masyarakat Indonesia, dan juga beras sebagai komoditas yang memiliki arti penting dari berbagai aspek, terutama ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan; maka menjadi tugas dan kewajiban Kementan untuk memastikan:

- (a) Penyediaan Beras Yang Cukup Dan Berkualitas Baik
- (b) Tersedia Di Seluruh Pelosok Sepanjang Tahun, Apalagi Pada Kondisi Ancaman Terpapar Pandemi Covid-19
- (c) Tingkat Harga Yang Wajar Yang Dapat Diakses Masyarakat.

Untuk itu, Kementan perlu menyusun desain kebijakan dan program serta mengkoordinasikannya dengan seluruh pemangku kepentingan guna mengamankan dan mencapai peningkatan produksi padi secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, maka pencapaian swasembada beras menjadi salah satu tujuan utama sekaligus menjadi tolok ukur kinerja keberhasilan Kementan.



“ Upaya mewujudkan swasembada beras tidak mudah, selain terdapat berbagai tantangan besar dalam peningkatan produksi, kebutuhan beras untuk memenuhi kebutuhan 273 juta penduduk volumenya cukup besar dan meningkat setiap tahun sesuai dengan pertumbuhan penduduk.

Tantangan dalam peningkatan produksi padi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga permasalahan pokok. Pertama tantangan yang sifatnya melekat (*inheren*) pada usaha tani dan sudah berlangsung sejak bertahun-tahun lamanya, yaitu: (a) terjadinya secara terus menerus konversi dan fragmentasi lahan pertanian, khususnya sawah ke penggunaan sektor ekonomi lain (infrastruktur ekonomi, tapak industri, perumahan), sedangkan lahan tersisa untuk perluasan sebagian besar adalah lahan sub-optimal; (b) meningkatnya persaingan penggunaan air untuk irigasi pertanian dan penggunaan aktivitas ekonomi lainnya; (c) menurunnya kualitas tanah dan air dampak dari eksploitasi dan pemanfaatan berlebihan dan polusi air dari aktivitas industri; (d) usaha pertanian padi sawah didominasi oleh pertanian skala kecil yang secara sendiri-sendiri tidak mampu memanfaatkan prinsip skala ekonomi, termasuk lemahnya kemampuan permodalan; dan (e) tenaga pertanian/petani, khususnya pada usaha tani padi sawah yang semakin menua (*aging*); dan sulitnya memperkuat kelembagaan pertanian yang terintegrasi.



Sebagai gambaran dari berbagai tantangan di atas, selama kurun waktu 2015-2019, luas baku lahan pertanian sawah mengalami penurunan sebesar -3,80 %/tahun yaitu dari 8,09 juta hektar pada tahun 2015 menjadi 7,46 juta hektar pada tahun 2019 (BPS, ATR/BPN). Dari hasil Survey Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018, BPS melaporkan pada tahun 2018 terdapat 27,68 juta rumah tangga usaha pertanian (RTUP), sebanyak 13,16 juta atau 47,5% adalah RTUP padi. Berdasarkan identifikasi luas pengusahaan lahan, RTUP yang mengusahakan lahan di bawah 0,5 hektar atau disebut petani gurem sebanyak 15,81 juta unit. Jumlah RTUP gurem ini meningkat 10,95% dibandingkan lima tahun sebelumnya (2013) sebesar 14,25 juta unit. Sementara itu, kepala RTUP yang berumur di atas 65 tahun sebanyak 4,12 juta orang (14,89%) dan yang berumur di atas 55 tahun sampai 65 tahun 6,26 juta orang (22,59%). Statistik di atas menggambarkan bahwa ketersediaan lahan pertanian, termasuk sawah semakin terbatas sementara jumlah pengguna atau RTUP meningkat, akibatnya luas pengusahaan lahan per RTUP menurun dan proporsi petani gurem semakin meningkat. Selain itu, proporsi petani usia tua juga meningkat, yang tentu saja kemampuan fisiknya secara umum semakin menurun.

Selain permasalahan *inheren* usaha pertanian di atas, tantangan besar kedua dalam upaya peningkatan produksi padi adalah dampak perubahan iklim global yang mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia, hewan dan tanaman.

Fenomena perubahan iklim ditandai oleh pergeseran siklus hidrologi alam yang dapat menyebabkan bencana alam seperti meningkatnya intensitas curah hujan sehingga terjadi banjir (kondisi *La Niña*) dan sebaliknya dapat menimbulkan kemarau panjang sehingga terjadi kekeringan (*El Niño*).



Bagi sektor pertanian dampak dari perubahan iklim akan menggeser pola dan kalender tanam, munculnya eksplosi hama dan penyakit tanaman yang dapat berdampak pada menurunnya produktivitas usaha pertanian sebagai akibat naiknya suhu udara.

Salah satu dampak negatif dari perubahan iklim ditunjukkan oleh data bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019) rata-rata

luas lahan sawah yang terkena banjir seluas 188.662 hektar (27,79% puso) dan yang mengalami kekeringan sekitar 255.974 hektar (29,39% puso). Khusus untuk usaha tani padi, dampak perubahan iklim dapat menyebabkan penurunan produksi dan produktivitas, apabila berbagai dampak tersebut tidak ditangani dengan cepat dan tepat.

Selain tantangan yang melekat pada usaha tani padi dan perubahan iklim global, upaya pencapaian swasembada beras mulai tahun 2020 diperberat dengan munculnya tantangan lainnya, yaitu Pandemi Covid - 19. Pandemi ini, walaupun masalah intinya terkait dengan aspek kesehatan, namun dampaknya mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia.

Kebijakan “*lockdown*” untuk suatu batas wilayah atau negara tertentu, yang dikenal juga dengan pembatasan mobilitas manusia yang diikuti dengan penutupan berbagai kegiatan bisnis, berakibat pada menurunnya *output* pasar tenaga kerja secara global, menurunkan permintaan agregat, dan juga meningkatkan harga barang kebutuhan pokok (termasuk pangan) yang memiliki elastisitas pendapatan inelastis.

Untuk sektor pertanian, pandemi ini mempengaruhi mobilitas petani dan tenaga kerja pertanian, menghambat distribusi sarana pertanian sampai ke petani, dan mengganggu alur rantai pasok atau pemasaran hasil-hasil pertanian. Dampaknya petani kesulitan mendapatkan sarana produksi seperti benih bersertifikat, pupuk dan pestisida di pasar, sementara kelancaran pemasaran hasil pertanian terhambat sehingga harga yang diterima petani menurun.

Dampak lain dari pandemi Covid-19 adalah beban RTUP juga bertambah dengan adanya para pekerja di perkotaan yang kembali ke keluarganya di perdesaan. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pada tahun 2020 lebih dari 1,5 juta orang telah kehilangan pekerjaan karena imbas pandemi Covid-19, sekitar 10,6% karena pemutusan hubungan kerja dan selebihnya (89,4%) dirumahkan sementara. Selain itu ada juga tenaga kerja yang dipertahankan tetap bekerja namun dengan jam kerja dan upah yang dikurangi.

Peningkatan jumlah tenaga kerja yang kembali ke desa pada masa pandemi Covid-19 tidak diimbangi dengan peluang kerja dan permintaan tenaga kerja di perdesaan. Aktivitas pertanian di perdesaan tidak meningkat, bahkan ada kecenderungan menurun akibat dampak pandemi dan dinamika perubahan iklim. Secara keseluruhan, situasi ketenagakerjaan seperti ini dapat mengganggu kemampuan RUTP untuk membiayai usaha tani dari sumber permodalan petani sendiri.

Baru-baru ini, pencapaian swasembada beras juga diperberat dengan adanya tekanan geopolitik dunia (perang Rusia dan Ukraina) yang menyebabkan harga input produksinya, khususnya pupuk melambung tinggi. Hal ini berdampak terhadap penggunaan pupuk dan biaya produksi, yang selanjutnya bisa berpengaruh terhadap penurunan produksi dan produktivitas padi.





## Menjadikan Tantangan sebagai Peluang

Tantangan peningkatan produksi padi seperti dibahas di atas memerlukan penanganan komprehensif, terukur, dan tepat serta cepat. Menteri Pertanian SYL merancang arah kebijakan dan program pencapaian swasembada beras dengan menjadikan tantangan sebagai peluang.

Untuk mewujudkan hal tersebut, SYL melakukannya dengan dua pendekatan filosofis yang “*smart*”. Pertama, semua tantangan dijadikan sebagai inspirasi dan motivasi dalam merancang upaya dan cara bertindak (program dan kebijakan). Kedua adalah mencari dan menyiapkan teknologi dan inovasi yang sesuai untuk mengatasi tantangan menuju keadaan yang lebih baik. Langkah mendasarnya adalah dengan penciptaan dan penerapan teknologi inovatif dan rekayasa sosial yang utamanya dihasilkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan). Sumber teknologi lainnya adalah perguruan tinggi dan lembaga penelitian internasional.

Tantangan yang dijadikan peluang tersebut untuk mengatasi permasalahan terkait dengan yang sifatnya melekat atau inheren pada usahatani padi, dampak perubahan iklim global, dan guncangan akibat Pandemi Covid-19.



Tantangan yang sifatnya melekat pada usaha tani padi terkait dengan perluasan areal pertanaman dan peningkatan produktivitas. Peningkatan luas areal tanam perlu dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip pembangunan pertanian berkelanjutan.

Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian eksisting (terutama sawah irigasi) dan pengembangan lahan sub-optimal. Dengan penggunaan

teknologi pengelolaan lahan dan tata guna air spesifik lokasi, dapat dikembangkan pola tanam padi indeks pertanaman (IP) 300 atau bahkan IP400. Kegiatan peningkatan IP tersebut adalah cara tanam dan panen tiga atau empat kali dalam satu tahun pada lahan yang sama, walaupun tidak harus selalu membudidayakan padi.

Teknologi IP300 dan IP400 dikembangkan di sawah irigasi teknis dengan ketersediaan air sepanjang tahun, bukan daerah endemis hama, dan pada hamparan sawah dengan karakteristik agro-ekosistem yang relatif seragam. Untuk keberhasilan kegiatan IP400 ini, di lapangan perlu dipastikan adanya ketersediaan air sepanjang tahun, mekanisasi dan penggunaan benih umur genjah dan super genjah dengan persemaian di luar (sistem *culik, dapog, tray*).

Selain peningkatan IP, perluasan areal tanam dilakukan pula dengan pengembangan atau pemanfaatan lahan sub-optimal seperti lahan kering, lahan rawa, serta pasang surut. Pemanfaatan lahan ini dilakukan dengan menerapkan prinsip kelestarian lingkungan, melalui teknologi pengolahan lahan, tata guna air, dan varietas yang cocok pada agro-ekosistem tersebut.

Salah satu contoh kegiatan pemanfaatan lahan sub-optimal adalah optimalisasi pemanfaatan lahan rawa (OPLA) yang memiliki potensi sebagai lahan produktif untuk usaha tani padi. Teknologi usaha tani yang diterapkan yang didesain untuk lahan rawa, termasuk varietas padi yang cocok ditanam di lahan jenis ini, yaitu varietas Inpara (Inbrida Padi Rawa). Balitbangtan sudah melepas beberapa jenis varietas Inpara ini.



Peningkatan produktivitas padi dilaksanakan dengan pengelolaan irigasi pertanian, peningkatan pemanfaatan benih padi unggul spesifik agro-ekosistem, pengelolaan sumber daya dan tanaman terpadu melalui pemupukan berimbang spesifik lokasi serta pemanfaatan pupuk organik, pengelolaan hama dan penyakit tanaman terpadu, dan penanganan panen dan pasca panen yang dapat menurunkan kehilangan hasil (*food losses*).

Berbagai teknologi tersebut sebenarnya sudah dikembangkan dan dimanfaatkan sejak beberapa tahun sebelumnya. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), berbagai teknologi peningkatan produktivitas tersebut disesuaikan, diperkaya, dan diperbaharui (*fine tuning*) untuk merespons dinamika tantangan yang dihadapi saat ini dan dijadikan peluang dalam upaya pencapaian swasembada beras.

Untuk mengatasi tantangan berupa adanya dominasi skala usaha kecil (*gurem*) pada usaha tani padi, tantangan ini dijawab dengan memanfaatkan peluang menangkap manfaat prinsip skala ekonomi (*economy of scale*) melalui peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya. Pengembangan korporasi petani dan Kawasan Sentra Produksi Pangan (*Food Estate*) merupakan dua inovasi rekayasa sosial-ekonomi yang penting dalam manajemen SYL untuk mewujudkan swasembada beras.

Korporasi petani adalah suatu satu kesatuan badan usaha yang dibentuk dari, oleh dan untuk petani. Efisiensi pemanfaatan sumber daya atau faktor produksi dilakukan dengan mengintegrasikan fungsi keseluruhan rantai nilai dari hulu ke hilir; subsistem prasarana, sarana dan budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran, serta jasa pendukung dan industri penunjang dengan budidaya pertanian sebagai simpul inti. Transformasi dari kegiatan usaha tani perseorangan menjadi usaha korporasi petani memerlukan: pola kerja petani menjadi berkelompok, penerapan prinsip bisnis korporasi, dan pemanfaatan teknologi inovatif yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing.



Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan atau *Food Estate* merupakan pengelolaan pertanian dengan pendekatan bisnis komersial berbasis wilayah atau kawasan. Kawasan *Food Estate* adalah kawasan yang ditetapkan sebagai lumbung pangan baru, merupakan kawasan pengembangan produksi pangan secara terpadu berdasarkan kecocokan/kelayakan tanaman/ ternak serta teknologi spesifik lokasi, memanfaatkan iptek berbasis sistem industri, mengimplementasikan organisasi dan manajemen kontemporer dengan menerapkan nilai-nilai korporasi yang dikelola petani. Dalam desain *Food Estate* pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan pendekatan kemitraan (*partnership*), termasuk dengan sektor swasta.

Sementara itu, untuk mengatasi dampak perubahan iklim, dimanfaatkan teknologi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, antara lain penggunaan varietas padi tahan cekaman kerendaman dan kekeringan, varietas padi toleran salinitas, aplikasi paket teknologi dan sistem informasi kalender tanam (KATAM), dan pemberdayaan petani dalam berusaha tani yang responsif terhadap perubahan iklim melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI) serta penggunaan *Internet of Thing* (IoT), teknologi *cyber* dan teknologi digital lainnya. Selain itu, beragam mekanisasi alat mesin pertanian *hi-tech* (*high technology*) dipersiapkan agar kaum *milenial* (pemuda/pemudi) tertarik pada pertanian, dan sekaligus menjadi upaya regenerasi petani mengatasi adanya kecenderungan para petani yang menua.



Respon untuk mengatasi dampak Pandemi Covid-19. Kementan merancang kebijakan untuk mempertahankan keberdayaan petani dalam berusahatani. Peluang yang dimanfaatkan adalah keberadaan teknologi digital yang dapat digunakan dalam praktik usahatani dan memperlancar sistem distribusi input serta pemasaran hasil pertanian.

Salah satu contohnya, yaitu memanfaatkan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) serta Toko Tani Indonesia (TTI) yang sudah dikembangkan tersebar di hampir seluruh provinsi, guna memangkas panjangnya rantai pasok pangan, khususnya beras dari petani sampai ke konsumen, dengan memanfaatkan teknologi digital serta bekerja sama dengan perusahaan layanan transportasi daring.

Upaya pemberdayaan petani dalam mengatasi dampak pandemi antara lain berupa pemberian bantuan sarana produksi (benih dan pupuk), fasilitasi untuk memperoleh permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR), mendorong dan memfasilitasi petani menjadi peserta asuransi usaha tani padi (AUTP), dan melakukan kegiatan padat karya untuk rehabilitasi sarana pertanian. Berbagai kegiatan ini merupakan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan keberdayaan dan insentif berusaha bagi petani dalam situasi pandemi.





### Box 1. Kementan Rumuskan Program Antisipasi Dampak La Nina TEMPO.co (4 November 2021)

INFO NASIONAL- Kementerian Pertanian (Kementan) merumuskan program aksi adaptasi antisipasi dampak badai La Nina. Rumusan program aksi itu untuk mengantisipasi sedini mungkin dampak yang akan ditimbulkan. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan bahwa pertanian merupakan sektor yang rentan terhadap perubahan iklim. Di sisi lain, pertanian tetap harus berjalan dalam situasi dan kondisi apapun.

"Untuk itulah perlu langkah serius agar pertanian ini dapat terus berjalan dalam situasi apapun. Kenapa begitu, sebab pertanian berkaitan dengan hajat hidup seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Arahan Menteri Pertanian SYL selanjutnya ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui delapan program aksi. Pertama, membentuk gerakan brigade yang terdiri dari brigade La Nina (Sargas OPT-DPI), brigade alsintan dan tanam, serta brigade panen dan serap gabah kostraling. Kedua, pompanisasi *in-out* dari sawah, rehabilitasi jaringan irigasi tersier atau kuartier terutama di wilayah rawan banjir. Ketiga, penyiapan bibit varietas padi tahan rendaman (Inpara 1-10, Inpara 29, Inpara 30 Ciherang sub 1, Inpara 42 agritan) dan toleran salinitas dan varietas unggul lokal yang sudah teruji.

Keempat, memperbaiki cara pascapanen dan mempersiapkan bantuan untuk kegiatan panen dan pascapanen dengan menggunakan pengering (*dryer*) dan RMU (*rice milling unit*). Kelima, mengoptimalkan penampungan air dengan pemanfaatan biopori, bangunan penampung air (BPA), normalisasi saluran drainase. Keenam, penerapan bedengan tinggi dan penggunaan sungkup plastik pada tanaman hortikultura. Ketujuh, pembuatan rorak, parit diskontinu, tanaman penutup tanah pada lahan perkebunan untuk menangkap air dan mencegah erosi. Terakhir, optimalisasi luas tanam pada lahan kering seperti tanaman hortikultura cabai dan bawang merah dengan penerapan PHT secara efektif, penggunaan varietas unggul toleran OPT dan teknologi inovasi budidaya lainnya [...]



Inovasi penting yang dikembangkan pada awal kepemimpinan Menteri Pertanian SYL adalah Komando Strategis Pertanian (Kostratani) yang menjadi salah satu program prioritas Kementan.

Gerakan Kostratani tersebut di daerah, terpusat di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) kecamatan sebagai pusat informasi dan komunikasi serta interaksi petani-penyuluh. Untuk mengetahui aktivitas Kostratani, terdapat ruang khusus untuk memantau segala kegiatan pembangunan di daerah, yaitu: *Agriculture War Room (AWR)*.

Untuk memantau gerakan Kostratani, digunakan sistem dan teknologi informasi dengan pencitraan satelit dan *artificial intelegent*.



Pengembangan Kostratani di kecamatan serta Kostrawil-Kostrada di kabupaten/ kota dan di 34 Provinsi; terintegrasi dengan Kostranas di Kementan dan didukung dengan ruang operasi dalam bentuk AWR. Dengan pemanfaatan AWR, kegiatan pertanian sampai di tingkat kecamatan bisa terlihat dan terpantau langsung.

Inovasi Kostratani dengan AWR-nya ini dimanfaatkan secara intensif untuk melakukan perencanaan, evaluasi, dan pengendalian implementasi program pembangunan pertanian, termasuk upaya peningkatan produksi padi guna mencapai swasembada beras. AWR, lebih jauh juga bisa berperan/berfungsi sebagai “*early warning sistem*” terhadap berbagai ancaman, terutama gangguan OPT serta dinamika dan perubahan iklim.





### **BAB III**

# **STRATEGI TEPAT DALAM KETERBATASAN**



Seperti telah diuraikan sebelumnya, periode 2020-2021 merupakan masa penuh tantangan, utamanya terkait dampak perubahan iklim dan pandemi Covid-19. Dari berbagai tantangan yang ada, keterbatasan anggaran yang dialokasikan di Kementerian Pertanian merupakan tantangan yang paling berat; karena program pembangunan pertanian di daerah hingga saat ini masih bergantung pada APBN.



## Pertama

Kementan segera melakukan penyesuaian program dan kegiatan untuk menangani permasalahan jangka pendek dampak pandemi Covid-19, tanpa mengabaikan kerangka kerja, arah, pendekatan, strategi, dan kebijakan yang sudah dirancang untuk lima tahun ke depan.

Penyesuaian (*refocusing*) program dan kegiatan dilakukan dalam upaya:

- (a) **Pencegahan penularan Covid-19 terutama di lingkungan Kementerian Pertanian;**
- (b) **Pengamanan ketersediaan pangan bagi masyarakat, utamanya beras; dan**
- (c) **Pendistribusian jaring pengaman sosial (*social safety net*) bagi petani untuk membantu menjaga daya beli sekaligus menjaga kemampuan untuk terus berusaha tani dan mengembangkan sarana dan prasarana pertanian guna mengantisipasi perubahan iklim (kekeringan dan/atau banjir).**



Menghadapi kondisi ini,  
**ada tiga strategi utama**  
yang dilakukan  
oleh manajemen SYL.

Guna menjamin ketersediaan pangan dalam kondisi pandemi dan perubahan iklim, Kementan merumuskan program yang dituangkan dalam bentuk **Lima Cara Bertindak (CB)**, yang meliputi:

- (1) Peningkatan kapasitas produksi,
- (2) Diversifikasi pangan lokal,
- (3) Penguatan cadangan dan sistem logistik pangan,
- (4) Pengembangan pertanian modern, dan
- (5) Peningkatan ekspor.

**Kedua**

Menyadari keterbatasan APBN di Kementan, maka manajemen SYL menggunakan filosofi **“budget for agriculture”**, yaitu memobilisasi anggaran nonAPBN untuk mendukung pembangunan pertanian, utamanya pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan melibatkan pelaku usaha (BUMN/Swasta). Operasionalisasi ketiga strategi utama tersebut diuraikan secara ringkas berikut ini.

**Ketiga**

# RAPAT KERJA NASIONAL PEMBANGUNAN PERTANIAN TAHUN 2021

Istana Negara, 11 Januari 2021



## Box 2. Di Depan Jokowi, Mentan Beberkan 5 Strategi Mendongkrak Sektor Pangan

KOMPAS.com-11 Januari 2021

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyatakan, arah kebijakan pembangunan sektor pertanian yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian (Kementan) kedepannya adalah maju, mandiri, dan modern. Hal itu diungkapkannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021 yang ditayangkan secara *virtual*, Senin (11/1/2021).

“Arah kebijakan ini menjadi pedoman untuk bertindak cerdas, tepat, dan cepat bagi jajaran kami dalam rangka mencapai kinerja yang lebih baik dan maju sesuai arahan Pak Presiden,” ujar Syahrul. Menurut dia, ada lima cara bertindak yang dilakukan Kementan untuk sektor pangan Indonesia. Pertama, peningkatan kapasitas produksi. Syahrul mengatakan, akan mengoptimalkan sumber daya nasional dan lokal, serta memanfaatkan perkembangan teknologi, untuk bisa meningkatkan produktivitas pertanian dalam negeri.

Kedua, diversifikasi pangan. Ini dilakukan dengan memanfaatkan semua pangan lokal yang ada di setiap provinsi untuk dikembangkan, sehingga pangan pokok tak hanya bergantung pada beras saja. Ketiga, mendorong pembangunan lumbung pangan. Syahrul mengatakan, lumbung pangan harus disediakan dalam skala desa, kabupaten, provinsi, dan nasional

Keempat, mendorong pertanian modern, yang menurut Syahrul saat ini sudah mulai dilakukan dengan teknik sungkup, mulsa, dan rumah tanam (*green house*). Serta kelima, mendorong ekspor pertanian tiga kali lipat. “Mekanisasi dan korporasi dilakukan dari hulu sampai hilir pertanian,” kata dia.

Syahrul menambahkan, beberapa program super prioritas yang menjadi arahan Jokowi juga terus dijalankan, seperti pembangunan lumbung pangan di beberapa provinsi, serta 1.000 desa perkebunan rumah tangga, di mana setiap keluarga menjadikan sisa lahan di rumahnya untuk perkebunan. “Serta ada program 10.000 desa sapi, yang juga merupakan petunjuk dari Pak Presiden,” pungkas Syahrul.

## Refocusing Program dan Anggaran



Langkah cepat dan tepat untuk menghadapi perubahan iklim dan pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021 memang sangat diperlukan dan manajemen SYL sangat memahami hal tersebut. Untuk itu, pada saat pandemi telah mengondisikan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat sangat terbatas dan telah mengakibatkan penurunan daya beli, maka program dan anggaran pembangunan pertanian harus dapat digunakan untuk menjamin dua hal sekaligus, yaitu memastikan produksi pertanian harus tetap berjalan dan daya beli petani tetap terjaga.

**Untuk itu, manajemen SYL mengarahkan pelaksanaan program social safety net disinergikan dengan upaya peningkatan produksi dan perbaikan sarana prasarana pertanian, yang meliputi:**

- (1) Padat karya gerakan pengendalian OPT, olah tanah, dan percepatan tanam.
- (2) Padat karya perkebunan.
- (3) Padat karya rehabilitasi prasarana jaringan irigasi tingkat usaha tani, embung pertanian, optimasi lahan rawa, irigasi perpipaan dan perpompaan untuk antisipasi kekeringan dan banjir.
- (4) Padat karya sekolah lapang petani, penumbuhan jiwa kewirausahaan, penyerapan tenaga kerja pertanian, dan pembinaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) pertanian.
- (5) Bantuan benih pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (6) Bantuan pangan dan penguatan kawasan rumah pangan lestari (KRPL).
- (7) Fasilitasi bantuan ayam/kambing/domba. Cakupan kegiatan ini secara langsung dan tidak langsung, sebagian besar diarahkan untuk sekaligus mendukung pelaksanaan usaha tani padi.

Apabila dilihat dari sisi besaran anggaran, pada tahun 2020 Kementan telah melakukan *refocusing* anggaran sebesar Rp2,59 triliun, yang terdiri dari dukungan pencegahan penularan Covid-19 sebesar Rp53,35 miliar, pengamanan ketersediaan pangan sebesar Rp1,41 triliun dan sekitar Rp1 triliun untuk jaring pengaman sosial. Selain itu, dalam rangka *refocusing* anggaran secara nasional, Kementan berkontribusi sebesar Rp7,01 triliun dalam bentuk pengurangan pagu anggaran, untuk penanggulangan pandemi Covid-19.



Program padat karya yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah atau pendapatan.

Sasaran utama Program Padat Karya ini adalah kelompok masyarakat miskin dan marjinal. Pemberian tambahan upah bagi peserta program ini akan meningkatkan daya beli untuk pemenuhan pangan yang cukup dan bergizi seimbang, terutama bagi mereka yang mengalami

Pelaksanaan Program Padat Karya dilakukan melalui sistem tunai (*cash for work*), yaitu pemberian upah langsung pada pekerja. Bersamaan dengan itu, manfaat Program Padat Karya adalah meningkatkan pembangunan atau rehabilitasi prasarana produktif, utamanya untuk mengamankan pelaksanaan usaha tani padi.

Tahun 2020, anggaran Program Padat Karya di Kementan sebesar Rp985 miliar; dan karena tidak terlalu besar maka manajemen SYL mengarahkan agar anggaran tersebut diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung produktivitas masyarakat perdesaan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.



Selain pekerja langsung mendapatkan uang tunai dari hasil kerjanya, infrastruktur yang dibangun melalui program ini juga sangat bermanfaat untuk mendukung kegiatan peningkatan produksi komoditas pertanian.

Jenis infrastruktur yang dibangun melalui Program Padat Karya pertanian, antara lain percepatan olah tanah dan tanam, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi desa (JIDES) dan jaringan irigasi tingkat usahatani, pembangunan embung, dan irigasi perpipaan. Diharapkan dengan keterlibatan masyarakat setempat dalam membangun berbagai prasarana tersebut diharapkan tumbuh rasa memiliki terhadap jaringan irigasi yang telah dibangun atau direhabilitasi.

Sementara Program Padat Karya yang berkaitan langsung dengan usaha tani padi, antara lain kegiatan percepatan olah tanah dan tanam, penanganan hama atau OPT, dan penanganan dampak kekeringan. Percepatan olah tanah dan tanam padi dilakukan untuk mengantisipasi perubahan iklim yang diperkirakan musim kemarau akan datang lebih awal. Langkah Kementan ini merupakan upaya untuk meningkatkan produksi padi guna menjamin ketersediaan beras nasional di tengah pandemi Covid-19.



## Strategi Lima Cara Bertindak

Strategi Lima Cara Bertindak (5 CB) yang dirumuskan manajemen SYL pada masa Pandemi Covid-19 dalam perkembangannya dijadikan sebagai strategi utama pembangunan pertanian. Dalam implementasinya, Cara Bertindak kesatu hingga kelima dapat diterapkan untuk pengembangan masing-masing komoditas pertanian, termasuk padi. Berikut uraian ringkas dari masing-masing Cara Bertindak tersebut:

- a. **Peningkatan kapasitas produksi** dilaksanakan dengan beberapa fokus kegiatan, yaitu pengembangan dan optimalisasi lahan rawa yang difokuskan di Kalimantan Tengah; perluasan areal tanam baru untuk komoditas strategis terutama padi, jagung, bawang merah, dan cabai merah yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan daerah yang masih defisit; serta peningkatan produksi dalam negeri untuk gula, daging sapi, dan bawang putih untuk mengurangi ketergantungan pada impor.
- b. **Peningkatan diversifikasi pangan** dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan sumber pangan karbohidrat pada beras dan meningkatkan ketersediaan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga. Peningkatan pangan sumber karbohidrat dilakukan secara massif sesuai dengan potensi wilayah dan preferensi masyarakat, dengan pengembangan dan pemanfaatan ubi kayu, jagung, sagu, pisang, kentang dan sorgum. Upaya peningkatan penyediaan pangan dan gizi dilaksanakan melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebun sekitar rumah. Melalui dua kegiatan ini, Kementan mendukung pencapaian ketahanan pangan dan gizi yang menjadi salah satu sasaran prioritas pembangunan nasional.

- c. **Penguatan cadangan pangan dan sistem logistik pangan** ditujukan untuk menjamin ketersediaan dan kecukupan pangan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia sepanjang waktu dengan tingkat harga yang terjangkau dan stabil serta kualitas yang baik.

Upaya ini dilakukan dengan: (i) penguatan Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP), (ii) penguatan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK); (iii) pengembangan lumbung pangan masyarakat (LPM) berbasis komunitas dan LPM Berbasis Desa (LPMDes), (iv) pengembangan kerja sama LPM dengan Komando Strategi Pembangunan Penggilingan Padi (Kostraling) di setiap lumbung pangan kecamatan, dan (v) penguatan sistem logistik pangan nasional untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan.



- d. **Pengembangan pertanian modern** dilakukan dengan (i) pengembangan *smart farming*, (ii) pengembangan dan pemanfaatan *screen house* untuk meningkatkan produksi komoditas hortikultura di luar musim tanam (cabai, bawang dan komoditas bernilai ekonomi tinggi), (iii) pengembangan *food estate* untuk peningkatan produksi pangan utama (beras/jagung) di Provinsi Kalimantan Tengah, dan (iv) pengembangan korporasi petani.
- e. **Peningkatan ekspor tiga kali lipat** merupakan suatu gerakan untuk: (i) meningkatkan volume ekspor melalui kerja sama dan investasi dengan pemda dan *stakeholder* terkait, (ii) menambah ragam komoditas ekspor dalam bentuk olahan hasil pertanian,



(iii) mendorong pertumbuhan eksportir baru melalui penumbuhan agropreneur, dan (iv) menambah mitra dagang luar negeri melalui kerja sama bilateral/ multilateral.

Strategi 5 CB di atas digunakan untuk menyusun program peningkatan produksi padi. Peningkatan produksi padi merupakan hasil dari upaya peningkatan luas areal panen dan produktivitas. Meskipun demikian dalam dua tahun terakhir peningkatan produksi lebih banyak didorong oleh peningkatan produktivitas.

Program peningkatan luas tanam melalui penambahan areal tanam baru (PATB) dan perlindungan konversi lahan pertanian mampu menghambat laju penurunan luas panen terkait dengan dinamika dan perubahan iklim dan dampak pandemi Covid-19 . Pada tahun 2020 terjadi penurunan luas panen padi sebesar 20,61 ribu hektar (0,19%) dibanding tahun 2019. Sementara pada tahun 2021 luas panen juga menurun sebesar 245 ribu hektar (2,30%).

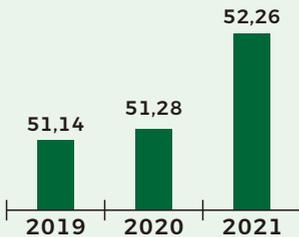
Peningkatan produktivitas padi merupakan hasil dari kebijakan/program yang selama ini dilaksanakan, namun dalam dua tahun terakhir ini dilakukan secara lebih terencana, fokus dan tepat sasaran. Program/kegiatan untuk memastikan peningkatan produktivitas tersebut adalah (a) pengelolaan air untuk usaha pertanian, (b) penyediaan dan distribusi benih unggul bersertifikat, (c) penyediaan dan distribusi pupuk bersubsidi dan pemanfaatan pupuk berimbang, (d) pengendalian hama terpadu (PHT), (e) penanganan kehilangan hasil saat panen, dan (f) pelaksanaan asuransi pertanian untuk usaha tani padi.

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah penyediaan inovasi pertanian serta pendampingan, penyuluhan, dan pemberdayaan petani dalam mengakses dan menerapkan teknologi usaha tani yang mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.

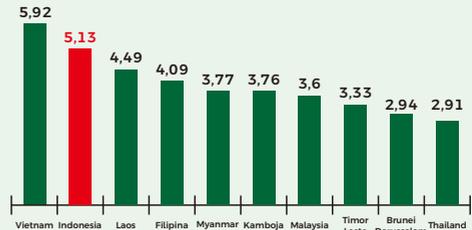
Program-program tersebut berhasil mendorong peningkatan produktivitas selama dua tahun berturut-turut. Pada tahun 2020 produktivitas mencapai 5,13 ton/ha atau meningkat 0,39% dari tahun 2019, sementara pada tahun 2021 produktivitas mencapai 5,23 ton/ha atau meningkat sebesar 1,95% dari tahun 2020.

**Gambar 3.1 Produktivitas Padi Indonesia Tertinggi Kedua di ASEAN**

**Produktivitas padi (Ku/Ha)**



**Produktivitas Padi di ASEAN, 2020. (ton/ha)**



Sumber : Data negara lain bersumber dari FAO.

- Peningkatan produktivitas tanaman padi mampu meningkatkan suplai beras dalam negeri. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan teknologi budidaya dan bantuan sarana produksi (Pipit, pupuk dan obat-obatan).
- Produktivitas tanaman padi Indonesia (termasuk padi ladang) kedua tertinggi di ASEAN setelah Vietnam

Berikut penjelasan ringkas dari upaya Kementan untuk memastikan berbagai program/kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana sehingga peningkatan produktivitas dapat dicapai:

- a. Air merupakan faktor produksi yang sangat menentukan pertumbuhan tanaman padi dan produktivitasnya. Untuk memastikan ketersediaan air pada lahan sawah, diupayakan dengan rehabilitasi jaringan irigasi tersier (RJIT), pembangunan embung/dam parit/ *longstorage*, irigasi perpompaan/perpipaan). Realisasi kegiatan pada tahun 2021 (Oktober) masing-masing adalah 4.228 unit untuk RJIT, 697 unit untuk pompa dan perpipaan, dan 379 unit untuk embung.
- b. Dengan kondisi lahan usaha dan agroekosistem yang sama, benih varietas unggul bersertifikat yang sama akan menghasilkan produktivitas lebih tinggi dibandingkan benih yang tidak bersertifikat. Pada tahun 2021 pemerintah mendistribusikan benih padi varietas



unggul bersertifikat berupa benih padi inbrida untuk 833 ribu ha dan benih padi hibrida untuk 9,2 ribu ha kepada petani.

- c. Benih unggul bersertifikat akan mencapai hasil tinggi sesuai potensinya apabila semua persyaratannya tanamnya dipenuhi, salah satunya pemupukan yang tepat dan berimbang sesuai anjuran. Walaupun biaya pemupukan tersebut sekitar 10 persen dari total biaya usaha tani (relatif rendah), temuan berbagai analisis menunjukkan, apabila pupuk bersubsidi tidak tersedia, petani skala kecil akan membeli jumlah pupuk yang lebih sedikit sesuai modal usaha tani yang dimilikinya.

Konsekuensinya, hal tersebut akan menyebabkan produktivitas padi turun. Oleh karena itu, Kementan tetap mengupayakan semaksimal mungkin agar anggaran subsidi pupuk tetap ada dan memastikan agar distribusinya memenuhi prinsip 6 tepat, dan pemakaiannya secara berimbang dan spesifik lokasi.

- d. Hama tanaman, apabila tidak diantisipasi dengan baik dari awal dapat menyebabkan terjadi serangan yang sangat luas (*outbreak*). Kementan melihat hal ini sebagai sesuai yang serius dan perlu penanganan yang sistematis. Pengamatan atau surveilan dini lapang oleh petugas, pendampingan dan pemberdayaan petani mengenali dan mengatasi serangan hama sejak dini, dan penyiapan bantuan pestisida yang sewaktu waktu siap dimanfaatkan, mampu menyelamatkan potensi produksi padi yang cukup signifikan.



- e. Proporsi kehilangan hasil saat panen diperkirakan cukup tinggi, yang dapat menurunkan ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Untuk menekan kehilangan hasil panen padi, Kementan memfasilitasi kelompok tani untuk melakukan panen dengan menggunakan *combine harvester* atau merontok dengan mesin perontok padi (*power thresher*). Pada tahun 2021 telah didistribusikan kedua alat panen tersebut sebanyak 188 unit dan 2.066 unit.
- f. Asuransi usaha tani padi (AUTP) memberikan perlindungan bagi petani dari kegagalan panen, sehingga memberikan kenyamanan bagi petani untuk melaksanakan usaha taninya, termasuk mengeluarkan biaya produksi dan menggunakan teknologi usaha tani sesuai anjuran.

Sikap positif petani ini dapat meningkatkan produktivitas dan produksi padi serta melindungi dari kehilangan total (*total loss*) pendapatan karena kegagalan panen. Penyaluran AUTP 2020 meningkat tajam dari Rp58,77 miliar menjadi Rp104,99 miliar (naik 78,65%).

Jumlah petani yang memperoleh layanan AUTP selama periode Januari- September 2020 mencapai 1.132.230 petani, yang tergabung dalam 31.932 kelompok tani, dan lahan usaha tani yang diasuransikan seluas 729.000 ha. Capaian penyaluran AUTP tahun 2020 hampir dua kali lipat capaian tahun 2019, dengan petani yang memperoleh layanan AUTP sebanyak 587.307 orang yang mencakup lahan yang terlayani seluas 408.143 ha.

- g. Balitbangtan menghasilkan invensi dan teknologi inovatif yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian pada berbagai agroekosistem dan spesifik lokasi, termasuk respons terhadap dampak perubahan iklim, tanpa mengabaikan upaya dalam





## Strategi “Budget for Agriculture”

Salah satu sumber pembiayaan yang didorong oleh manajemen SYL untuk mengatasi keterbatasan APBN adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemanfaatan KUR utamanya diarahkan untuk membantu permodalan petani. Pemenuhan kebutuhan permodalan sangat penting dalam usaha agribisnis, termasuk agribisnis padi.

Untuk itu, pada tahun 2007 pemerintah mengintroduksi skema KUR yang diperuntukkan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) di semua sektor, termasuk sektor pertanian. Kinerja penyaluran KUR di sektor pertanian pada tahun 2020 mencapai Rp55,3 triliun melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp50 triliun dan meningkat tajam dibanding tahun 2019 yang hanya tersalurkan sebesar Rp29,8 Triliun.

Keberhasilan penyaluran KUR di sektor pertanian berlanjut pada tahun 2021, dimana realisasi KUR pertanian mencapai Rp85,62 triliun atau 122,31% dari target Rp70 triliun dan melibatkan 2,6 juta debitur. Capaian ini juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp55,3 triliun. Penyaluran KUR pertanian 2021 terdiri atas KUR tanaman pangan Rp23,03 triliun (terutama untuk padi, jagung, ubi kayu, dan penggilingan padi); KUR perkebunan Rp29,74 triliun; KUR peternakan Rp15,54 triliun; KUR hortikultura Rp10,67 triliun; serta KUR untuk jasa pertanian dan lainnya sebesar Rp6,63 triliun.

Peningkatan penyaluran KUR terjadi untuk semua subsektor pertanian, kecuali subsektor peternakan. Kenaikan penyaluran KUR terbesar terjadi pada subsektor perkebunan. Penyaluran KUR antar waktu selama periode Januari-September 2019-2020 memiliki pola yang hampir mirip. Penyaluran KUR cenderung meningkat pada bulan Februari dan Juli dibandingkan pada bulan-bulan lainnya selama periode tersebut, baik pada tahun 2019 maupun 2020.

Gambar 3.2 Kinerja Pembiayaan KUR Sektor Pertanian, 2020-2021

	2020		2021	
 <b>Total</b>	<b>Rp. 55,30 T</b> Realisasi 110,62% Dari Target Rp. 50 T	<b>1,9 Juta Debitur</b>	<b>Rp. 85,62 T</b> Realisasi 122,31% Dari Target Rp. 70 T	<b>2,6 Juta Debitur</b>
 <b>Tanaman Pangan</b>	<b>Rp. 15,46 T</b> Realisasi 108,88 % Dari Target Rp. 14,23 T	<b>703.179 Debitur</b>	<b>Rp. 23,03 T</b> Realisasi 149% Dari Realisasi 2020 Rp. 15,46 T	<b>851,288 Debitur</b>
 <b>Hortikultura</b>	<b>Rp. 7,09 T</b> Realisasi 110,08% Dari Target Rp. 6,39 T	<b>289.808 Debitur</b>	<b>Rp. 10,67 T</b> Realisasi 150,49% Dari Realisasi 2020 Rp. 7,09 T	<b>372,479 Debitur</b>
 <b>Perkebunan</b>	<b>Rp. 18,16 T</b> Realisasi 89,19% Dari Target Rp. 20,37 T	<b>463.572 Debitur</b>	<b>Rp. 29,74 T</b> Realisasi 163,77% Dari Realisasi 2020 Rp. 18,16 T	<b>678,720 Debitur</b>
 <b>Peternakan</b>	<b>Rp. 10,66 T</b> Realisasi 118,37% Dari Target Rp. 9,01 T	<b>356.759 Debitur</b>	<b>Rp.15,54 T</b> Realisasi 145,78% dari Realisasi 2020 Rp. 10,66 T	<b>462.346 Debitur</b>
 <b>Kombinasi Dan Lainnya</b>	<b>Rp. 3,91T</b>	<b>171.211 Debitur</b>	<b>Rp. 6,63 T</b>	<b>249.856 Debitur</b>

Sumber : Kementerian Keuangan

Pada tahun 2020 dukungan pembiayaan KUR untuk sektor pertanian di empat subsektor (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan), ternyata sangat besar, yaitu Rp51,37 Triliun. Nilai KUR tersebut hampir tujuh kali lipat dibandingkan dengan APBN murni di keempat subsektor tersebut. Bahkan untuk subsektor perkebunan, pembiayaan dari KUR mencapai delapan belas kali lipat dari APBN Ditjen Perkebunan. Ini menunjukkan bahwa pendanaan untuk pembangunan sektor pertanian sebagian besar berasal dari luar APBN. Anggaran yang berasal dari APBN meliputi sebagian kecil dan sebagai pemicu untuk pembangunan sektor pertanian secara keseluruhan.

Strategi "budget for agriculture" juga diimplementasikan di kegiatan Food Estate (FE) Kalimantan Tengah. Program FE yang merupakan arahan langsung Presiden Joko Widodo diorientasikan untuk memperkuat cadangan logistik nasional, mengurangi ketergantungan pada impor, dan sekaligus untuk merespons peringatan Dirjen FAO terkait potensi krisis pangan yang akan melanda dunia karena pandemi Covid-19 dan dampak perubahan iklim global yang intensitasnya semakin tinggi dan tidak menentu. Optimalisasi lahan dalam program ini nantinya digunakan untuk memproduksi bahan pangan pokok atau komoditas pangan lainnya.



Pelaksanaan FE tahun 2021, Kementan melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait dan Pemerintah Daerah mendistribusikan tanggung jawab sesuai tupoksi masing-masing, sebagai berikut:

1. Kementerian Pertanian bertanggung jawab melakukan SID penyiapan lahan, pengolahan tanah, intensifikasi dan dukungan alsintan saat pra tanam, selanjutnya memberikan dukungan sarana produksi (benih, dolomit, pupuk, herbisida) serta, pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) saat penanaman, memberikan dukungan mesin dan alat pengolahan pasca panen dan promosi serta fasilitasi pemasaran.
2. Kementerian LHK bertanggung jawab dalam dukungan penyusunan AMDAL, *Rapid Assesement*, penyiapan sertifikat tanah dan pemanfaatan lahan perhutanan.
3. Kementerian PUPR bertanggung jawab membangun dan merehabilitasi irigasi, penyiapan dokumen AMDAL dan penyiapan SID kanal/saluran irigasi.
4. Dukungan juga diupayakan dari Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Desa PDTT, Pemda, dan Perusahaan Asuransi.
5. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab memastikan program yang dirancang dapat terlaksana dengan baik di lapangan, termasuk kegiatan dan penyuluhan dan pendampingan kepada petani.

**Box 3. Capaian KUR Pertanian Tertinggi Di 2021,  
Menko Airlangga Apresiasi Mentan SYL  
SINDOnews.com pada Selasa, 18 Januari 2022**

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan penghargaan atas capaian penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL). Mentan dinilai sukses mengawal penyaluran KUR pertanian dengan jumlah yang sangat besar. Sebagai informasi, serapan realisasi KUR di sektor pertanian pada tahun 2021 mencapai Rp85,62 triliun atau 122,31% dari target Rp70 triliun dengan 2,6 juta debitur.

"Capaian penyaluran KUR Kementan selama 2021 sangatlah besar, dimana tahun 2021 telah dinikmati oleh 7,5 juta debitur dan permintaannya terus meningkat," ujar Airlangga yang juga menjabat Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, Selasa (18/1/2022). Menko Airlangga juga mengapresiasi penyaluran KUR pertanian yang digulirkan Kementan selama beberapa tahun terakhir. Fasilitas KUR, tegas dia, mampu memberi dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Layanan KUR dinilai mampu membuat banyak petani kembali menghidupkan usaha taninya. "KUR berdampak besar terhadap pengembangan usaha peternakan terintegrasi, pengembangan industri rumput laut, padat karya pertanian dan perikanan, kartu tani pupuk bersubsidi, pengendalian alih fungsi lahan dan pengembangan korporasi petani," paparnya. Dalam kesempatan itu, Mentan Syahrul Yasin Limpo menyampaikan terima kasihnya atas perhatian Menko Perekonomian terhadap jalannya program KUR Pertanian yang telah bergulir selama beberapa tahun terakhir. Khususnya, kata Mentan, dalam mendukung upaya peningkatan pangan nasional. "Kami menyadari keterbatasan anggaran pemerintah, tidak akan mampu sepenuhnya membiayai sektor pertanian. Karenanya capaian KUR yang sangat baik ini, kami juga ucapkan terima kasih kepada Himbara, petani dan kepada semua pihak yang mendukung jalannya pertanian maju, mandiri dan modern," ujar Syahrul Yasin Limpo. Mentan juga menegaskan komitmen Kementan untuk terus memacu sektor pertanian agar kesejahteraan petani tercapai dengan membantu permodalan usaha tani dan mampu bertahan di tengah badai pandemi Covid-19.

Untuk diketahui, tingginya realisasi penyaluran KUR sektor pertanian tidak terlepas dari inovasi dan kebijakan KUR sektor pertanian yang dilakukan Kementan seperti meningkatkan KUR tanpa agunan tambahan. Kemudian, pemberian fasilitas KUR khusus untuk kelompok

(cluster) komoditas pertanian dan komoditas produktif lainnya dengan perusahaan mitra sebagai bapak angkat (*offtaker*). Selain itu, relaksasi ketentuan KUR berupa penundaan pembayaran pokok, perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit KUR. Tahun ini, pemerintah menaikkan plafon KUR menjadi Rp373,17 triliun. Untuk itu Menko Airlangga berharap bahwa UMKM dapat termotivasi dan KUR bisa disalurkan dengan baik. "Saya ucapkan selamat dan juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan Saya harap pelaksanaan KUR pada tahun 2022 akan menjadi lebih baik lagi dari pada tahun 2021," tandasnya.

Melalui sinergi dari berbagai K/L tersebut diharapkan kegiatan FE di Kalimantan Tengah akan berjalan optimal dan menghasilkan output yang maksimal dalam mendukung penyediaan pangan penduduk, serta memberikan dampak ekonomi di daerah. Dengan demikian kekhawatiran FAO akan bahaya kekurangan pangan seperti yang disampaikan sebelumnya sebagai peringatan akibat dampak Covid-19 tidak terjadi di Indonesia.









## BAB IV

# KEBUTUHAN TERPENUHI, KETAHANAN PANGAN TERJAGA





Tahun 2020-2021 merupakan periode waktu yang sangat berat bagi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia untuk mempertahankan capaian ketahanan pangan dan gizi. Selain permasalahan yang melekat di sektor pertanian dan perubahan iklim global yang intensitas dan frekuensinya semakin tinggi, peningkatan produksi pangan menghadapi tambahan tantangan yang tidak mudah, yaitu di awal 2020 muncul pandemi Covid-19.

Dalam situasi perekonomian yang sulit karena ada pembatasan pergerakan sosial baik global maupun nasional, pemenuhan pangan pokok beras dari produksi dalam negeri menjadi suatu keharusan untuk menjaga ketahanan pangan, stabilitas sosial dan ekonomi, bahkan stabilitas politik.

Tugas pemerintah untuk menjamin penyediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk, terutama dari produksi dalam negeri diamanatkan kepada Kementan. Menghadapi tantangan dalam situasi yang tidak biasa ini, untuk menjalankan amanat yang diembannya, Menteri Pertanian SYL mendesain kebijakan, program, dan kegiatan peningkatan produksi pangan dengan rancangan inovatif, seperti yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya.

Seperti diindikasikan oleh data dari BPS, berbagai upaya tersebut membuahkan hasil. Secara umum dapat dikemukakan bahwa “pada tahun 2020-2022 capaian produksi beras domestik mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, bahkan mengalami surplus”. Pada lebih dari dua tahun masa pandemi Covid-19 tersebut, Indonesia “mampu mencapai swasembada beras”. Di samping itu, “status capaian ketahanan pangan dan gizi juga dapat dipertahankan”.



## Swasembada Beras di Masa Pandemi

Produksi padi tahun 2020, tahun pertama pandemi Covid-19, mencapai 54,65 juta ton gabah kering giling (GKG), naik sedikit (0,1%) dibandingkan produksi tahun sebelumnya sebesar 54,60 juta ton GKG. Pada 2021, tahun kedua pandemi, produksi padi menurun sebesar 0,4% menjadi 54.42 juta ton GKG.

Penurunan produksi ini disebabkan oleh penurunan luas panen, sementara produktivitas dalam periode tersebut tetap meningkat. Penurunan luas panen diduga disebabkan oleh dampak perubahan iklim ekstrem yang intensitasnya semakin tinggi dan tidak mudah diprediksi serta pandemi Covid-19 yang membatasi pergerakan sosial manusia/petani dan input produksi.

Data ini mencerminkan bahwa fasilitasi pemerintah untuk mendorong petani tetap berusaha tani secara optimal dimasa pandemi tercapai. Pencapaian tersebut dicirikan dengan meningkatnya angka produktivitas padi/hektar, pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 0,4% dan 1,9%. Pada tahun 2021 luas panen padi sebesar 10,41 juta hektar dengan produktivitas 5,23 ton/hektar.



Selama periode 2020-2021 stabilitas penyediaan dan harga beras sepanjang tahun dapat terjaga. Kondisi ini merupakan hasil dari kombinasi volume produksi padi dalam negeri yang cukup dan pengelolaan cadangan beras pemerintah yang tepat. Dibarengi dengan program jaring pengaman sosial berupa bantuan pangan beras bagi rumah tangga berpendapatan rendah dan transfer uang bagi pekerja/buruh yang mengalami kehilangan pekerjaan, masyarakat Indonesia mampu mendapatkan beras yang cukup sebagai pangan pokok sumber karbohidrat.

Kinerja ekonomi padi ini, yang merupakan komponen penting bagi sektor pertanian, menjadikan sektor ini sebagai bantalan bagi perekonomian nasional. Pada tahun 2020 ekonomi nasional mengalami resesi, dan banyak ahli yang mengatakan sektor pertanian mampu menyangga ekonomi Indonesia tidak mengalami resesi lebih dalam lagi. Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 1,75% dan 1,90%. Sementara itu, pertumbuhan PDB nasional pada dua tahun tersebut masing-masing sebesar -2,07% dan 3,69%.

**Box 4. Jokowi Sebut Indonesia  
Sudah Tidak Impor Beras  
Selama 3 Tahun,  
JAKARTA, KOMPAS.Com  
(21 Mei 2022)**



Presiden Joko Widodo menyatakan, Indonesia sudah tidak mengimpor beras selama tiga tahun terakhir setelah sebelumnya mengimpor 1,5-2,0 juta ton beras setiap tahunnya. Ia berharap, capaian tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan menggenjot produktivitas petani beras di dalam negeri.

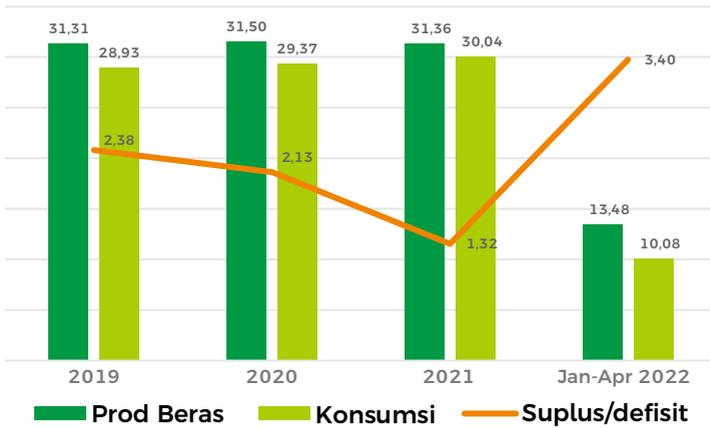
“yang biasanya kita impor 1,5 juta sampai 2 juta ton per tahun, sudah 3 tahun ini kita tidak. Ini yang harus dipertahankan, syukur stoknya bisa kita perbesar. Artinya, produktivitas petani itu harus ditingkatkan,” kata Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional V Projo.

Kendati demikian, Jokowi mengakui, Indonesia memang masih mengimpor beras-beras khusus dari luar negeri, misalnya beras khas Jepang, Korea, dan India untuk konsumsi warga negara tersebut di Indonesia. “meskipun ada impor, kecil, tapi itu beras-beras khusus,” ujar mantan Wali Kota Solo tersebut.

Jokowi melanjutkan, harga beras di Indonesia juga berada di bawah rata-rata, yakni Rp10.700 per kilogram. Ia membandingkan dengan harga beras di Korea Selatan sebesar Rp53.000 per kilogram, Rp52.000 per kilogram di Amerika Serikat, dan Rp18.000 per kilogram di Filipina. “Ini yang harus kita syukuri dan kita sudah 3 tahun ini tidak impor, yang namanya beras tidak impor sama sekali sudah tiga tahun,” kata Jokowi

Penyediaan beras dari produksi padi dalam negeri dalam periode pandemi Covid-19 mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi seluruh masyarakat Indonesia. Produksi beras pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 31,50 juta ton dan 31,36 juta ton, sementara kebutuhan konsumsinya lebih rendah, yaitu sebesar 29,37 juta ton dan 30,04 ton. Dengan demikian, terdapat neraca beras surplus pada tahun 2020 sebesar 2,13 juta ton dan tahun 2021 sebesar 1,32 juta ton Gambar 4.1).

**Gambar 4.1** Produksi, Konsumsi, Dan Surplus Beras Nasional, 2019-2022



Dari data BPS diketahui pada masa pandemi tersebut memang terdapat impor beras lebih dari 300 ribu ton/tahun. Namun beras impor ini tidak ditujukan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat secara umum. Seperti dikemukakan di atas, untuk total kebutuhan beras untuk konsumsi sekitar 30 juta ton, sepenuhnya dapat dipenuhi dari produksi domestik. Beras yang diimpor berupa jenis khusus untuk memenuhi kebutuhan konsumen tertentu, seperti beras jenis Basmati, Japonica, Hom Mali, beras rendak glikemik indeks sebagai beras sehat, dan beras pecah 100 persen untuk keperluan industri pangan (tepung dan bihin).



## Ketahanan Pangan Nasional Terjaga

Kinerja ketahanan pangan dapat diukur dengan tiga indikator yang disepakati secara internasional, yaitu *Prevalence of Under Nourishment* (PoU) atau prevalensi kekurangan gizi, *Food Insecurity Experience Scale* (FIES) atau Skala Pengalaman Kerawanan Pangan, dan *Ideally Dietary Pattern* (IDF) atau Pola Pangan Harapan (PPH).

Secara ringkas, pengertian ketiga indikator tersebut dengan mengacu ke *Food and Agriculture Organization* (FAO) sebagai berikut. PoU adalah prevalensi masyarakat yang mengonsumsi pangan dengan volume yang menghasilkan energi di bawah atau kurang dari kecukupan energi untuk dapat hidup sehat dan aktif.

Prevalensi FIES mengukur proporsi individu dalam populasi yang memiliki pengalaman atau mengalami tingkat kerawanan pangan sedang atau berat, setidaknya sekali dalam 12 bulan terakhir. Skala pengalaman ini berkisar dari ketidakmampuan untuk mendapatkan makanan dalam jumlah yang cukup, ketidakmampuan untuk mengonsumsi makanan yang berkualitas dan beragam, terpaksa untuk mengurangi porsi makan atau mengurangi frekuensi makan dalam sehari, hingga kondisi ekstrem merasa lapar karena tidak mendapatkan makanan sama sekali. Makin rendah angka PoU dan prevalensi FIES suatu wilayah atau negara, kondisi ketahanannya semakin baik.

Skor PPH menggambarkan besaran komposisi kelompok pangan utama yang apabila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Susunan beragam pangan didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari sembilan kelompok pangan dengan mempertimbangkan faktor daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama. Makin tinggi skor PPH makin baik kualitas komposisi gizi yang dikonsumsi, dengan skor ideal 100.

Dalam periode 2019-2021 angka PoU naik dengan tingkat pertumbuhan melamban setiap tahunnya. Pada tahun 2020 angka PoU meningkat sebesar 0,71% sedangkan tahun 2021 naik 0.15%, dari 8,34% (2020) menjadi 8.49% (2021). Data ini menunjukkan pandemi meningkatkan prevalensi masyarakat yang kekurangan gizi, namun dengan peningkatan yang relatif kecil.

Sementara itu, pada periode yang sama, prevalensi FIES menurun setiap tahun dari 5,42% (2019) menjadi 5,12% (2020) dan turun lagi menjadi 4,79% (2021). Penurunan prevalensi FIES ini dapat dikatakan sebagai hasil positif dari kebijakan jaring pengaman sosial (*social safety net*) pemerintah pada masa pandemi, berupa distribusi bantuan pangan (Program Sembako) dan distribusi transfer uang kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan sementara.

Pada masa awal pandemi, Program Sembako diperluas penerimanya menjadi 20 juta rumah tangga dengan nilai bantuan per bulan dinaikkan menjadi Rp 200 ribu, meningkat. Program jaring pengaman sosial ini membantu rasa aman rumah tangga dalam memperoleh pangan, terutama pangan pokok beras. Untuk peningkatan gizi masyarakat, khususnya pencegahan stunting, Kementerian memfasilitasi penanaman varietas padi kaya Seng (Zn) Inpari IR *Nutrzinc*

Untuk skor PPH, pada tahun 2020 (skor 86,3) turun dibandingkan tahun 2019 (skor 87,9) atau memburuk, tetapi pada tahun berikutnya kembali membaik dengan skor 87,2. Data ini memperlihatkan adanya perbaikan mutu konsumsi pangan dan gizi pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Pemulihan status ketahanan pangan dan gizi mulai terlihat dari data tersebut. Nilai ketiga indikator ketahanan pangan tersebut disajikan dalam Tabel 4.1.

**Tabel 4. 1 Angka PoU, prevalensi FIES, dan skor PPH, 2019-2021**

Tahun	PoU (%)	FIES (%)	PPH (skor)
2019	7,63	5,42	87,9
2020	8,34	5,12	86,3
2021	8,49	4,79	87,2

Sumber : BPS (2021) dan BKP (2021)



### **Box. 5. ATASI STUNTING, KEMANTAN TANAM 50.000 HA PADI INPARI IR NUTRIZINC**

SINDOnews.com pada Selasa, 03 November 2020

JAKARTA - Pemerintah telah mencanangkan prevalensi stunting sebagai prioritas nasional ditekan serendah-rendahnya dengan target 14 persen pada tahun 2024. Diketahui, salah satu faktor yang menyebabkan kekerdilan atau stunting yakni kurangnya konsumsi gizi *zinc* (*Zn*) yang terjadi di masyarakat, utamanya pada anak-anak [...]

[...] Sebelumnya pada berbagai kesempatan, Menteri Pertanian Mentan Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengajak seluruh lapisan masyarakat agar melakukan gerakan bercocok tanam untuk menurunkan angka stunting pada daerah rentan rawan pangan. Terdapat 17 provinsi dan terdiri atas 267 kabupaten di 900 kecamatan yang masuk daerah rawan pangan. "Selama ini masyarakat mengonsumsi beras tanpa memperhatikan kelengkapan gizi. Dengan adanya Padi Inpari *IR Nutri Zinc* akan menjadi salah satu sumber pangan dengan kandungan *zinc* 6 persen lebih tinggi daripada Ciherang. Saya harus jamin di daerah rentan itu tidak stunting. Inovasi dan pengembangan benih padi nutrisi tinggi anti stunting Inpari *IR-Nutri Zinc* ini salah satu terobosannya," ujar Komandan sapaan akrab SYL. SYL menegaskan Kementan terus mengkonsolidasikan berbagai terobosan inovasi dan teknologi untuk terus memperkuat ketahanan pangan dengan meningkatkan produksi dan menghasilkan komoditas pangan khususnya mengatasi stunting. Dengan demikian ke depan bangsa Indonesia mampu berdaulat penuh atas pangan dan menghidupi negara-negara lain atau dunia. "Ke depan kita tidak menutup kemungkinan ekspor. Apalagi peran sektor pertanian dalam perekonomian nasional menjadi yang terdepan, terutama di era pandemi Covid 19," ucapnya [...]



Kesimpulan umum dari capaian indikator kinerja tersebut adalah ketahanan pangan nasional memang terganggu atau menurun dengan adanya pandemi Covid-19. Namun demikian, penurunannya tidak terjadi secara drastis, bahkan di tahun 2021 sudah mulai kelihatan adanya tanda untuk kembali pulih. Komponen pendukung pencapaian ketahanan pangan sangat beragam, tidak hanya dari kinerja penyediaan atau produksi pangan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh kelancaran rantai pasok pangan; daya beli masyarakat; pola konsumsi, pengetahuan gizi, dan preferensi pangan rumah tangga; dan kondisi sanitasi lingkungan setempat. Namun demikian, bagi masyarakat Indonesia, beras merupakan makanan pokok sumber karbohidrat utama dan sebagian masih mempunyai pola pikir dan budaya konsumsi “belum makan kalau belum makan nasi”. Dengan demikian, produksi beras yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang stabil sepanjang tahun, memiliki sumbangan penting terhadap kinerja ketahanan pangan nasional selama masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021.





## **BAB V**

# **PEMBELAJARAN MANAJEMEN SYL**





Sebagai komoditas pangan pokok dan strategis, upaya mencapai dan mempertahankan pemenuhan kebutuhan beras dari produksi domestik (baca: swasembada) senantiasa dilakukan oleh setiap rezim pemerintahan. Namun dalam dua tahun terakhir, upaya perwujudan swasembada beras oleh manajemen SYL dilakukan secara lebih terencana, fokus dan tepat sasaran, yang kebetulan menghadapi dua tantangan sekaligus, yakni dampak perubahan iklim dan pandemi Covid-19 sebagai “Tantangan Yang Tidak Biasa”. Bahkan terakhir muncul tantangan tekanan geopolitik dunia, dengan adanya perang Rusia-Ukraina.

Dalam uraian sebelumnya terlihat bahwa upaya perwujudan swasembada beras yang dilakukan oleh manajemen SYL melibatkan banyak pihak. Dengan demikian, dalam implementasinya tentu terdapat aspek keberhasilan dan kekurangan yang dapat dijadikan pembelajaran untuk mempertahankan capaian swasembada beras maupun peningkatan produksi komoditas pertanian yang lain secara berkelanjutan.

Untuk itu, dalam bagian ini akan diuraikan berbagai pembelajaran dari manajemen SYL dalam mewujudkan swasembada beras, baik dari sisi keberhasilan maupun kekurangan dalam pelaksanaannya.





## Keberhasilan Manajemen SYL

Manajemen SYL paham benar bahwa negara dengan ciri seperti Indonesia, yaitu wilayah yang menyebar dalam bentuk gugusan-gugusan pulau, jumlah penduduk yang besar dan menyebar tidak merata, ketimpangan pendapatan yang tinggi, dan pertanian merupakan sektor ekonomi utama; maka kebijakan umum negara yang meletakkan ketahanan pangan sebagai salah satu pilar penopang keberlanjutan pemerintahan negara dan bangsa Indonesia sudah tepat.

Dengan garis kebijakan tersebut, program dan kegiatan Kementan diarahkan untuk mencapai ketahanan pangan berlandaskan kemampuan sendiri. Ketersediaan pangan beras domestik selama dua tahun terakhir termasuk juga pada tahun 2022 ini dapat dipenuhi dari produksi domestik dan pasokannya merata sepanjang tahun sehingga tidak terjadi gejolak pasokan dan harga.

Ada beberapa pembelajaran positif dari manajemen SYL dalam mewujudkan swasembada beras, yaitu:

- a. Respons cepat dan tepat terhadap peringatan dini ancaman perubahan iklim yang diperparah oleh Pandemi Covid-19; sehingga tidak kehilangan momentum dalam proses perencanaan hingga implementasi kegiatan. Langkah ini tercermin dari gerak cepat melakukan *refocusing* program dan anggaran Kementan dan koordinasi dengan pihak terkait, khususnya pemerintah daerah.
- b. Cermat dalam melakukan pemetaan tantangan dan peluang, sehingga diperoleh jalan keluar optimal meskipun dalam situasi keterbatasan. Terkait hal ini, aspek utama yang diarahkan adalah perlindungan terhadap petani, baik dari paparan Covid-19 maupun menjaga daya belinya. Rancangan kegiatan *social safety net* yang



diarahkan untuk perbaikan infrastruktur pertanian yang dikerjakan oleh para petani, dapat diperoleh dua manfaat sekaligus, yaitu ketersediaan air untuk menjamin pelaksanaan usaha tani padi dan menjaga daya beli petani sehingga pemeliharaan tanaman masih dapat dilakukan secara optimal

- c. Skenarioantisipasi terhadap ancaman perubahan iklim dirancang secara lengkap, baik antisipasi kekeringan maupun banjir. Melalui langkah ini, perubahan situasi di lapangan dapat segera ditangani dan dimanfaatkan peluang positifnya. Sebagai contoh, kondisi *La Nina* yang tidak terlalu berat (musim hujan yang lebih panjang) pada tahun 2020 dapat dimanfaatkan untuk perluasan areal tanam baru padi, khususnya di daerah lahan kering.
- d. Memadukan ketersediaan Kredit Usaha Rakyat (dukungan permodalan) dengan asuransi usaha tani padi (dukungan perlindungan petani). Perpaduan keduanya mengkondisikan rasa aman dan nyaman bagi petani untuk menjalankan usaha tani padinya.
- e. Penguatan manajemen pembangunan pertanian melalui sinergi dengan K/L terkait, Perguruan Tinggi, serta gubernur dan bupati/walikota. Upaya ini juga menjadi kunci capaian positif kinerja Kementan, terutama dalam perwujudan swasembada beras.
- f. Pemanfaatan *big data*, teknologi digital dan sistem informasi untuk proses perencanaan, dan pengendalian dan evaluasi serta untuk melakukan pendampingan dan pelatihan kepada petani di seluruh Indonesia. Melalui tatap muka secara *virtual*, kendala pembatasan mobilitas dan aktivitas masyarakat selama pandemi dapat diatasi, sehingga informasi teknologi tetap dapat tersampaikan kepada petani.
- g. Penerapan inovasi teknologi serta alat dan mesin pertanian modern sangat berperan untuk mendorong peningkatan produktivitas dan indeks pertanaman. Perpaduan keduanya mengkondisikan peningkatan produksi padi tahun 2020 dan menjaga penurunan produksi tahun 2021 tidak terlalu dalam, sehingga masih terdapat surplus produksi.

# Optimalisasi Manajemen SYL



Selain keberhasilan, manajemen SYL juga mempunyai “pekerjaan rumah” terkait dengan strategi pembangunan pertanian yang masih perlu dioptimalkan pelaksanaannya di lapangan. Artinya, upaya peningkatan produksi padi masih dapat lebih ditingkatkan melalui perbaikan program dan kegiatan yang masih belum berjalan optimal di lapangan.

Beberapa “pekerjaan rumah” dari manajemen SYL yang masih dapat dioptimalkan, antara lain:

- a. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap APBN Kementan masih tinggi, sehingga apabila terjadi *refocusing* (baca: pengurangan) anggaran, maka pelaksanaan pembangunan pertanian di daerah menjadi terganggu. Sebagai gambaran, berdasarkan data dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, anggaran APBD di bidang pertanian di 34 provinsi sebagian besar masih di bawah 5% dari total APBD.
- b. Keterpaduan pelaksanaan pembangunan pertanian dengan K/L terkait juga masih perlu dibenahi, khususnya berkaitan dengan kesesuaian lokasi dan waktu pelaksanaan. Sinergi kegiatan pembangunan antar K/L yang terkait dengan sektor pertanian merupakan perwujudan strategi “*budget for agriculture*”, dan untuk mengimplementasikannya (dengan kondisi saat ini), harus diorkestrasi oleh Presiden.
- c. Ketersediaan sumber daya lahan merupakan syarat utama usaha pertanian, namun laju konversi lahan pertanian ke nonpertanian hingga saat ini masih terjadi. Berbagai regulasi sudah diterbitkan oleh pemerintah, namun belum dapat digunakan secara optimal untuk menahan laju konversi lahan pertanian, utamanya dalam pengimplementasiannya di tataran pemerintah daerah.



- d. Tanpa disadari, fokus pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan produksi padi masih lebih banyak dilakukan di daerah yang tingkat produktivitasnya lebih tinggi. Perubahan fokus lokasi program dan kegiatan di daerah yang tingkat produktivitasnya masih relatif rendah dapat menjadi salah satu peluang untuk mendorong peningkatan produksi padi di masa mendatang dan yang menjadi pengungkit utamanya adalah teknologi inovatif dan rekayasa kelembagaan petani.
- e. Nota kesepahaman yang sudah dibuat dengan Kementerian Dalam Negeri perlu dioptimalkan untuk mendorong pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) agar mengalokasikan APBD sektor pertanian secara lebih memadai dan menggerakkan aparaturnya daerah, khususnya Camat dan Kepala Desa, dalam pelaksanaan pembangunan pertanian.
- f. Pendampingan dan pengawalan oleh penyuluh pertanian masih perlu ditingkatkan lagi. Keberadaan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian harus dimanfaatkan secara optimal.
- g. Strategi pengembangan kelembagaan korporasi petani untuk usaha tani padi harus diwujudkan secara nyata dan luas. Pendekatan ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi tantangan yang berkaitan dengan skala penguasaan lahan petani padi yang umumnya relatif kecil (gurem).

# Upaya Menjaga Swasembada Berkelanjutan

Upaya menjaga swasembada beras secara berkelanjutan dilakukan melalui pendekatan dari aspek produksi dan konsumsi. Untuk itu, strategi kebijakan yang dirumuskan oleh manajemen SYL ke depan terbagi atas upaya peningkatan produksi padi dan penurunan pangsa konsumsi beras sebagai sumber karbohidrat.



## A. Strategi Peningkatan Produksi Padi

- a. Program intensifikasi melalui kegiatan yang diarahkan untuk peningkatan produktivitas padi. Berdasarkan data KSA BPS masih ada 25 provinsi (dengan berbagai karakteristik lahannya) yang dapat dijadikan sebagai lokus utama peningkatan produktivitas padi. Rencana aksi yang dapat dilakukan antara lain:
  1. Penyediaan sarana produksi, utamanya benih dan pupuk, secara 6 tepat. Operasionalisasi rencana aksi ini melalui perubahan fokus kegiatan bantuan benih dan penyediaan pupuk bersubsidi di daerah dan atau lahan yang tingkat produktivitasnya masih rendah (di bawah 5 ton/ha).
  2. Optimalisasi bantuan alsintan (pra panen, panen, dan pascapanen) dan/atau rencana bantuan alsintan diarahkan pada daerah yang tingkat produktivitasnya masih rendah.
  3. Perbaikan penanganan pascapanen gabah (penjemuran dan penggilingan). Kehilangan hasil selama proses penjemuran masih sekitar 5%, sehingga apabila dapat kurangi menjadi sekitar 3% maka ada potensi tambahan produksi gabah 2%. Untuk penggilingan, modernisasi RMU dapat meningkatkan rendemen gabah ke beras dan kualitas beras. Operasionalisasi kegiatan ini nantinya dapat bekerja sama dengan Persatuan Penggilingan Padi Indonesia (Perpadi)



- b. Program ekstensifikasi melalui (utamanya) peningkatan indeks panen yang berdasarkan data KSA BPS ada sekitar 2,2 juta hektar (30%) yang masih di bawah 1,42. Rencana aksi yang dapat dilakukan antara lain:
1. Perbaiki tata kelola (termasuk penyediaan) sumber daya air. Operasionalisasi rencana aksi ini dilakukan melalui optimalisasi bantuan pompa air dan pemanfaatan embung yang telah dibangun sebelumnya.
  2. Perbaiki jaringan irigasi untuk memperluas jangkauan layanan air. Kegiatan ini dapat dipadukan dengan program padat karya.
  3. Penggunaan benih padi berumur pendek (genjah) untuk mengoptimalkan ketersediaan air; dan disertai dengan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT).



## B. Strategi Konsumsi dan Diversifikasi Sumber Karbohidrat

- a. Menggalakkan kembali program/gerakan mengurangi konsumsi beras/nasi melalui pengembangan pangan lokal sebagai pendamping beras. Program *One Day No Rice* yang pernah dilakukan Kementerian Pertanian beberapa waktu lalu dapat dimodifikasi untuk disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini.
- b. Mendorong pelaku usaha pangan untuk mengembangkan bahan pangan alternatif sumber karbohidrat. Penetrasi gandum dapat dijadikan contoh untuk pengembangan sumber karbohidrat lain yang dapat diproduksi di dalam negeri, seperti ubi kayu, sorgum, dan sagu.
- c. Program pengenalan sumber karbohidrat selain beras sejak dini (usia Sekolah Dasar).



- C. **Peningkatan efisiensi distribusi beras**, melalui penyediaan informasi harga dan peta wilayah surplus dan defisit, serta penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran, akan meningkatkan transparansi pasar beras sehingga rantai distribusi akan lebih efisien serta margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) akan turun. Penyusunan neraca ketersediaan beras tiap provinsi dengan mempertimbangkan perilaku pembelian dan stok di pelaku distribusi dan konsumsi beras perlu dilakukan sebagai bahan pertimbangan kebijakan stabilisasi harga, berupa penyerapan produk saat panen raya dan operasi pasar pada saat terjadi lonjakan harga atau kelangkaan pasokan.



**D. Pengendalian Konversi Lahan Sawah** dengan mengupayakan implementasi UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Belum efektifnya penerapan UU tersebut dapat dibarengi dengan penggunaan *local wisdom* untuk pengendalian konversi lahan sawah. Contoh *local wisdom* yang dapat menahan laju konversi lahan adalah di Sumatera Barat (lahan sebagai harta pusaka tidak boleh diperjualbelikan) dan di Jawa Tengah (masyarakat Samin di Kabupaten Blora mempunyai keyakinan bahwa lahan pertanian milik alam sehingga tidak boleh diperjualbelikan).

**E. Mendorong peningkatan *general subsidy*** (subsidi umum) untuk meningkatkan efisiensi usaha pertanian, khususnya usaha tani padi. Bentuk *general subsidy* antara lain pembangunan bendungan, jaringan irigasi, jalan usaha tani, dan infrastruktur usahatani lainnya.



 **INPARA 2**

Definis : 928 Variasi Seleksi-2 Sember  
Produktifitas Hasil : 9,200 T/ha/Year  
Materi Pengujian : Tuberakad berkecambah 5% oleh  
A1  
Tipe Hama : Pijet

## BAB VI

# PENUTUP







Bagi Indonesia, berdasarkan posisi strategis beras sebagai komoditas pangan, maka padi, beras, nasi adalah salah satu sumber kehidupan utama bangsa ini. Politik beras akan tetap menjadi platform siapa pun Presiden dan Menteri Pertanian untuk 15 maupun 20 tahun yang akan datang. Pengalaman tiga tahun terakhir menunjukkan stabilitas harga beras berkontribusi positif terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan politik; utamanya pada saat pandemi. Stabilitas harga beras mampu menjadi peredam pada saat terjadi gejolak harga pangan non-beras. Diyakini bahwa terwujudnya swasembada beras selama tiga tahun terakhir bukanlah “keberuntungan”, namun hasil dari suatu program dan kebijakan yang didesain (*by design*) melalui manajemen SYL. Ada tiga hal yang dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa swasembada beras yang dicapai selama tiga tahun terakhir bukanlah suatu “keberuntungan”. Pertama, teknologi digital melalui AWR dimanfaatkan secara intensif untuk mengatasi pembatasan mobilitas individu, khususnya para penyuluh, agar dapat terus memberikan pendampingan dan bimbingan usaha tani padi. Kedua, program bantuan sosial yang disinergikan dengan perbaikan infrastruktur irigasi; benar-benar dapat membantu petani dari dua sisi, yaitu keterjaminan pelaksanaan usaha tani padi dan menjaga daya beli petani, sehingga tetap mempunyai kemampuan untuk membeli input usaha tani. Ketiga, pemanfaatan KUR, utamanya oleh usaha penggilingan padi, mampu mengondisikan gabah petani dapat terjual dengan tingkat harga yang menguntungkan. Hal ini menjadi insentif petani untuk tetap melaksanakan usaha tani padi di tengah pandemi.

Keberhasilan swasembada beras selama tiga tahun terakhir diapresiasi oleh lembaga internasional pertanian, antara lain *International Rice Research Institute (IRRI)* dan *Food and Agriculture Organization (FAO)*. IRRI memberikan penghargaan



(acknowledgment) kepada Presiden Joko Widodo atas pencapaian ketahanan sistem pangan dan pertanian serta swasembada beras selama 2019-2021 melalui pemanfaatan teknologi inovasi padi (*achieving agri-food systems resiliency and rice self-sufficiency during 2019-2021 through the application of rice innovation technology*). Selain itu, IRRI juga memberikan penghargaan kepada Menteri Pertanian SYL sebagai seorang pemimpin inovatif dalam transformasi sistem pangan dan pertanian serta mitra strategis IRRI dalam pengembangan sektor padi secara holistik dan berkelanjutan (*an innovative leader in agri-food system transformation and IRRI strategic partner for developing the rice sector in a holistic and sustainable manner*). Pemberian apresiasi dari FAO dituangkan dalam surat kepada Menteri Pertanian SYL yang dinarasikan dalam kalimat: “Perkenankan saya mengucapkan selamat atas kinerja sektor pertanian yang mengesankan di seluruh Republik Indonesia, meskipun terjadi dampak buruk dari Pandemi Covid-19 ...”. (*Allow me to congratulate you on the impressive performance of the agriculture sector across the Republic of Indonesia, despite the devastating impact of the Covid-19 Pandemic...*).

Keberhasilan manajemen SYL ini tentu harus dipertahankan keberlanjutannya. Salah satu dasar kebijakan manajemen SYL yang perlu dilanjutkan adalah memberikan kesempatan besar kepada para pelaku usaha (swasta maupun BUMN/BUMD) untuk mendorong peningkatan produksi pertanian, termasuk padi. Peran pemerintah dengan APBNnya diarahkan untuk memfasilitasi para pelaku usaha membantu para petani dan membuat percontohan (*pilot project*) perbaikan teknis budi daya berbasis teknologi maju. Peran pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) juga harus selaras dan semakin besar kontribusinya dalam pelaksanaan pembangunan pertanian, terutama dalam mempertahankan capaian swasembada beras.



## FAO dan IRRI Akui Ketangguhan Sektor Pertanian Indonesia di Tengah Krisis



Ketangguhan sektor pertanian Indonesia yang bisa bertahan di tengah krisis pandemi dan krisis lain yang menyertainya, serta keberhasilan swasembada beras, telah diakui oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI). Pengakuan tersebut pun diwujudkan dalam bentuk penyerahan penghargaan bagi pemerintah Indonesia yang diberikan oleh Direktur Jenderal IRRI, Jean Balie, kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Minggu, 14 Agustus 2022.

"Alasan utama saya datang jauh-jauh dari Filipina adalah untuk memberikan penghargaan ini kepada Presiden karena pada dasarnya Indonesia sudah memiliki tingkat swasembada beras yang cukup tinggi yang menarik dan perlu diakui. Juga alasan lain yaitu keinginan untuk merayakan kerja sama yang langgeng dan sukses antara IRRI dan Indonesia khususnya dalam pengembangan sektor beras," ujar Jean Balie.

Menurut Jean Balie, Indonesia jelas menjadi contoh karena telah menunjukkan bahwa selama pandemi yang sangat mempengaruhi berbagai negara, Indonesia telah berhasil meningkatkan tingkat produktivitas produksi dan mencapai tingkat swasembada yang tinggi.

"Ini merupakan hasil dari adopsi teknologi yang tinggi, pelatihan petani yang baik, juga kinerja penyuluhan yang sangat baik dan kerja sama yang sangat baik antarinstansi dan khususnya antara IRRI dan pemerintah Indonesia," lanjut Balie.

Senada, Representasi FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rajendra Aryal, menilai bahwa penghargaan yang diberikan IRRI kepada pemerintah Indonesia merupakan sebuah pencapaian besar bagi Indonesia, terutama terkait swasembada beras. Terlebih, pencapaian tersebut diraih Indonesia di tengah krisis pandemi Covid-19 dan ketidakstabilan situasi geopolitik global.

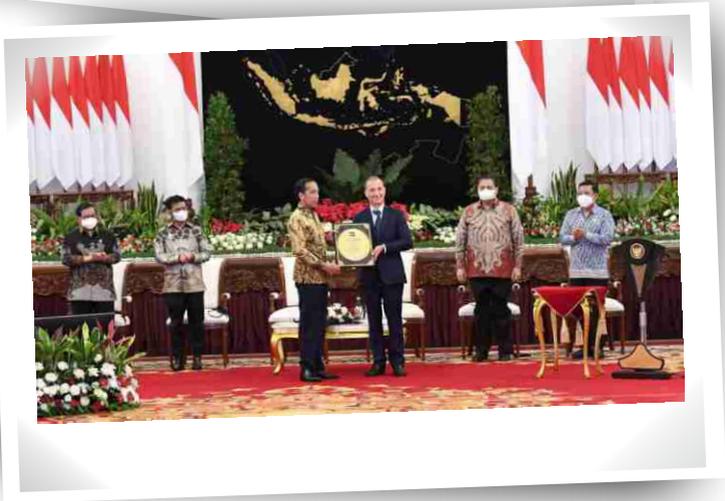
"Saya katakan bahwa ini adalah pencapaian besar yang telah dicapai Indonesia karena kita telah melihat hampir tidak ada impor beras kecuali untuk varietas premium. Impor jagung juga telah stabil, jadi saya akan mengatakan bahwa ini adalah pencapaian besar dan ini merupakan tonggak utama menuju sistem pangan pertanian yang tangguh di negara ini. Jadi saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia untuk mendapatkan penghargaan ini dan mendapatkan pengakuan ini dari IRRI," ujar Rajendra Aryal.

Lebih lanjut, FAO berkomitmen untuk terus membantu Indonesia dalam menyediakan dukungan keahlian teknis yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi pangan. Rajendra melanjutkan, pihaknya juga siap untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk bisa mempertahankan pencapaian swasembada ini menuju ketahanan sektor pertanian yang lebih baik ke depannya.

"FAO akan bersedia berkomitmen untuk menyediakan keahlian teknis yang dibutuhkan untuk produksi yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih baik. Seperti yang saya katakan Indonesia telah jauh ke depan, kita perlu mempertahankan itu dan seperti yang dikatakan Bapak Presiden: kita perlu bekerja sama untuk pembangunan pertanian. Saya pikir Indonesia akan mampu mempertahankan momentum ini dan kita semua bersama-sama di dalamnya," tandasnya.

Jakarta, 14 Agustus 2022  
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: <https://www.presidentri.go.id>  
YouTube: Sekretariat Presiden



# Profil

## Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo



Syahrul Yasin Limpo yang lebih dikenal SYL lahir di Makassar, 16 Maret 1955, merupakan anak kedua dari pasangan Muh. Yasin Limpo dengan Nurhayati Yasin Limpo.

Riwayat Pendidikan yang dilaluinya cukup luar biasa. SYL menempuh pendidikan di Makassar sejak SD hingga berhasil meraih gelar profesor kehormatan. Pada tahun 1967, tamat di SD Negeri Mangkura Makassar, 1970 menyelesaikan pendidikannya di SMP Negeri 6 Makassar. Kemudian pada tahun 1973, tamat SMA Katolik Cenderawasih Ujung Pandang.

Tapak karirnya di pemerintahan dimulai saat dia terangkat PNS pada tahun 1980 dan menjabat Kepala Seksi Tata Kota Tahun 1982. Selanjutnya sebagai Kepala Sub Bagian Perangkat IV & V PD. Biro Pemerintahan Umum Tahun 1983. Di tahun yang sama SYL meraih gelar sarjana di Fakultas Hukum Unhas.

Pasca meraih gelar sarjana, jiwa kepemimpinan SYL terus mencuat yang kemudian membuat dia menjadi Kepala Wilayah Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa Tahun 1984, Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tk. I Sulsel Tahun 1987, Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tk. I Sulsel Tahun 1988 dan Kepala Bagian Urusan Generasi Muda & OR Setwilda Tk. I Sulsel Tahun 1989. Dia juga menjabat Sekretaris Wilayah Daerah Tk. II Kabupaten Gowa Tahun 1991 dan Kepala Biro Humas Setwilda Tk. I Tahun 1993.

Dia kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mengambil gelar magister di Pascasarjana Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang diselesaikannya pada tahun 1999. Selain di LAN, dia juga mengambil S2-nya di Universitas Hasanuddin (Unhas), Fakultas Hukum (FH) dan selesai tahun 2004. Kemudian meraih gelar doktornya di FH Unhas pada tahun 2008. Hingga pada akhirnya, SYL dikukuhkan sebagai guru besar kehormatan Universitas Hasanuddin (Unhas) di Bidang Hukum

Tata Negara dan Pemerintahan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) pada 17 Maret 2022.

SYL juga aktif di organisasi kepemudaan sebelum terjun ke dunia politik seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sejak tahun 1990-1993 dengan jabatan Sekretaris DPP KNPI Sulsel. Kemudian tahun 1993-1998 sebagai Ketua DPP Angkatan Muda Pembangunan Indonesia (AMPI) Sulsel. Periode 1993-1998, dia menjadi Sekretaris DPP Golkar Sulsel dan Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) pusat.

Tahun 2004-2008 menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) Sulsel sekaligus sebagai Ketua Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Sulsel. Selanjutnya, Ketua Kwarda Gerakan Pramuka sejak tahun 2004. Ketua Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 57 tahun 1998. Dia juga sempat menjabat Ketua Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Sulsel.

Pada tahun 2009-2018, SYL menjabat sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel. Kemudian akhirnya menjabat Ketua DPP Partai NasDem pada tahun 2018 hingga saat ini.

SYL terpilih sebagai Bupati Gowa dua periode sejak tahun 1994 sampai tahun 2002. Kemudian Wakil Gubernur Sulsel 2003-2008 mendampingi Amin Syam. Dia terpilih menjadi Gubernur Sulsel pertama yang dipilih secara langsung dalam pilkada 2007 bersama Agus Arifin, kemudian kembali terpilih di periode kedua hingga tahun 2018. Tahun pertama menjadi Gubernur, Syahrul menargetkan peningkatan posisi Sulawesi Selatan sebagai provinsi penyangga beras untuk kebutuhan nasional. Alhasil, Sulawesi Selatan diubahnya menjadi salah satu provinsi lumbung beras nasional. Atas prestasi tersebut, SYL pun dianugerahi Penghargaan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Utama Bidang Pertanian oleh Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2011. Hal itu juga yang telah membuat Presiden Joko Widodo memberikan amanah kepadanya agar menahkodai sektor pertanian nasional dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, tepat 23 Oktober 2019.

Sebagai Menteri Pertanian ke-28, SYL lantas tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan Presiden Joko Widodo dan membuktikan diri mampu mewujudkan swasembada beras nasional di tengah tantangan yang tidak biasa melalui peningkatan produksi dalam negeri sehingga Indonesia tercatat tidak melakukan impor beras dari tahun 2019 hingga saat ini.

Mengarungi tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, julukan negeri gemah ripah loh jinawi memang pantas disematkan untuk ibu Pertiwi melalui kinerja sektor pertanian yang menggembirakan khususnya capaian swasembada beras. Rindu bangsa Indonesia untuk menyandang predikat swasembada beras telah berhasil terwujud kembali. Tanpa keraguan, prestasi ini terukir kembali oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang memastikan Indonesia berhasil swasembada beras dan tidak mengimpor beras.

Buku **“Langkah SYL Mewujudkan Swasembada Beras Ditengah Tantangan Yang Tidak Biasa”** ini menguraikan berbagai tantangan yang serasa kian menjauhkan impian pencapaian swasembada beras nasional, namun berkat manajemen SYL terbukti mampu membuahkan sebuah program dan kebijakan yang didesain (*by design*) untuk merubah tantangan yang ada menjadi sebuah peluang, sehingga swasembada beras nasional yang dirindukan itu terwujud dalam tiga tahun terakhir ini. Hal tersebut yang melatarbelakangi dituliskannya buku ini agar berbagai kebijakan SYL terus mendukung keberlanjutan swasembada beras, bukan hanya fatamorgana sesaat, bahkan mengembangkannya pada komoditas strategis lainnya. Buku ini disusun oleh pakar terkait dengan bahasa sederhana agar masyarakat umum dapat memperoleh informasi yang jelas tentang program dan kebijakan swasembada beras semasa SYL memegang tongkat amanah sebagai Menteri Pertanian.

Lebih jauh, bertepatan dengan momentum 77 Tahun Indonesia Merdeka, buku ini menjadi sebuah kado indah sebagai bentuk warisan (*legacy*) untuk disampaikan kepada generasi penerus berikutnya. Dengan begitu, generasi penerus diharapkan mendapatkan pembelajaran dalam mengambil peran aktif menyusun langkah dalam mewujudkan pembangunan pertanian khususnya dalam mewujudkan program dan kebijakan swasembada beras semasa Menteri Pertanian SYL menahkodai pertanian Indonesia. Selamat membaca.